Kebenaran di balik *greenwash* APP

Laporan Investigasi
Eyes on the Forest

Diterbitkan Desember 2011

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan Penyelamat Hutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : http://www.eyesontheforest.or.id
Email: eof@eyesontheforest.or.id

1. Latar belakang

Pada 1984, Kelompok Sinar Mas Group yakni Asia Pulp & Paper (SMG/APP), bermarkas di Shanghai, China, mulai mengoperasikan pabrik pengolahan pulp-nya pertama di Provinsi Riau di pulau Sumatera[1]. Pabrik pengolahan itu, Indah Kiat Pulp & Paper, adalah 'pabrik pengolahan pulp raksasa' di Indonesia dengan kapasitas produksi 105.000 ton per tahun. Pada 1994, APP membuka pabrik pengolahan pulp keduanya, Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, di provinsi Jambi. Kedua pabrik pengolahan secara eksklusif mengolah kayukeras tropis campuran (MTH) dari penebangan hutan alam. Kedua pabrik pengolahan itu terus berekspansi.

Itulah kenapa sejak 1999, para pelanggan, kreditor, ilmuwan, dan masyarakat sipil terus menyerukan SMG/APP untuk tidak menggunakan kayu dari hutan alam untuk memproduksi pulp dan kertasnya[2, 3, 4, 5, 6, 7] dan melaksanakan dua kebijakan utama:

1. Operasi berdasarkan *"Prinsip 9*. Mempertahankan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi *(HCVFs) didefinisikan sebagai nilai-nilai lingkungan dan sosial yang dipertimbangkan menjadi signifikansi kentara atau kepentingan yang sangat perlu[8]"* dari Forest Stewardship Council's [1].
2. Tidak ada lagi ekspansi kapasitas produksi pulp atau membangun pabrik pengolahan baru hingga perkebunana bertanggungjawab dan lestari terwujudkan di kawasan yang baru ditebang.

SMG/APP menolak berkomitmen pada permintaan-permintaan ini dan meneruskan ekspansi kapasitas pulpnya, melumat hutan alam dan membuka lahan gambut seperti didokumentasikan secara detil oleh Eyes on the Forest dan banyak organisasi lainnya. Hingga 2010, kapasitas produksi pulp total SMG/APP di Sumatera telah tumbuh setidaknya 2,7 juta ton per tahun. Selain itu, SMG/APP telah menambah pabrik pengolahan pulp berkapasitas 1 juta ton per tahun di China pada 2005[9]. SMG/APP tidak memiliki pasokan perkebunan memadai guna menyuplai pabrik-pabrik pengolahannya, namun merencanakan mengembangkan setidaknya dua pabrik pengolahan pulp baru di Indonesia dalam waktu dekat.

Sementara SMG/APP terus beroperasi di provinsi Riau dan Jambi, tutupan hutan di daerah-daerah ini maupun di Sumatera terus menyusut menjadi kurang dari 30% massa daratan pulau; harimau, gajah dan orangutan Sumatera mendekati kepunahan melalui konflik manusia-satwaliar yang meningkat dan tekanan perburuan diakibatkan oleh semakin berkurangnya habitat hutan alam; dan lebih banyak lagi lahan gambut dibuka, melepas stok karbon yang tersimpan lebih dari ribuan tahun[10]. Dengan hutan alam terakses di Sumatera hampir tuntas, APP kini mulai menargetkan hutan alam dan lahan gambut di Kalimantan dan Papua.

Kehancuran diakibatkan oleh perusahaan kertas Sinar Mas Group telah membawa menuju kritik global yang intens oleh masyarakat sipil dan pelanggannya. Respon SMG/APP masih terus klasik, ia meneruskan bisnis seperti biasanya namun sumberdaya yang luas kepada kampanye green-wash global, didanai oleh penghancuran hutan Sumatera.

Pada 2006, SMG/APP menerbitkan iklan sehalaman penuh *"APP's Commitment: Conservation Beyond Compliance"* di harian New York Times dan London Times –aksi humas global yang besar dan pertama – yang secara keliru menggambarkan dirinya sebagai perusahaan pelindung hutan dan satwaliar yang bertanggungjawab. WWF Indonesia menjawab topik per topik yang membantah secara detil kesalahan pernyataan oleh perusahaan itu[11].

Hari ini, lima tahun kemudian, APP terus mengulangi pernyataan keliru yang sama

[1] Prakteknya, ini kepada komisi sebelum adanya penebangan hutan alam dengan penilaian independen dan transparan dengan perangkat "Toolkit *HCVF untuk Indonesia*[1]" guna mengidentifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, serta melindungi dan mempertahankan semuanya.

bersama-sama sejumlah pembalikan yang baru, yang semuanya mencoba menyembunyikan landasan puncak dari operasi Sinar Mas Group/APP: penghancuran terus menerus hutan alam tropis dan pembukaan lahan gambut. Upaya humas APP saat ini semakin besar dan dengan penggunaan media lebih agresif daripada sebelumnya yang pernah ada. APP telah merekrut beragam tokoh untuk publikasi, individu dan LSM yang tampak independen membantu publikasi dugaan praktek hijaunya, termasuk oleh Cohn & Wolfe[12], Environmental Resource Management[13], Alan Oxley dan kelompoknya World Growth serta ITS Global[14, 15, 16], Mazars[17], Carbon Conservation[18], Patrick Moore dan kelompoknya Greenspirit Strategies[19], Bastoni dan Yayasan Pelestarian Harimau Sumatera (YPHS)[20], Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI)[21] dan Allyn Media[22]. Perusahaan ini juga memasang iklan globalnya di CNN, Sky TV dan kanal-kanal siaran internasional lainnya.

Dalam laporan ini, Eyes on the Forest menginvestigasi klaim-klaim humas APP. Apakah ada kemajuan pada praktek SMG/APP di lapangan? Apakah ada pengurangan dampak perusahaan terhadap hutan alam tropis paling beragam di dunia, satwaliar, dan iklim dunia?

Jawabannya terus terang saja: Tidak. SMG/APP terus membuka lahan gambut dalam serta menebangi hutan alam dan dampak negatifnya semakin meningkat dengan skala operasinya.

Kami berharap laporan akan membantu pemerintah-pemerintah, perusahaan-perusahaan dan pelanggan memahami sejumlah realitas lapangan yang berlawanan dengan pesan humas APP, serta untuk mengajak bergabung banyak perusahaan bertanggungjawab yang telah memilih melepas kerjasama dengan SMG/APP agar tidak menjadi bagian masalah dan kontribusi bagi punahnya hutan tropis alam paling beraneka di dunia, bagi kepunahan satwaliar mereka, serta dampak dramatis bagi perubahan iklim.

Fakta-fakta ada, terbuka, bagi setiap orang untuk melihat dan bagi setiap orang untuk mengeceknya. Datang dan kunjungi Sumatera – dan jika Anda putuskan naik dengan salah satu helikopter SMG/APP, pastikan Anda yang memberitahu kepada pilot tujuan yang akan dilihat…

Koleksi iklan terbaru APP yang dipublikasikan secara online, pada TV, dan salinan

lainnya di berbagai negara pada 2011. *Searah jarum jam dari kiri atas, "APP CARES www.asiapulppaper.com" merek terdaftar di AS pada 2010[23]; "Letter to Stakeholders: Getting the Facts Down on Paper" APP pada 2010[24]; "Surat Terbuka kepada WWF" dipostingkan di blog APP "Rainforest Realities" pada 9 Mei 2011[25]; Iklan komersial TV "APP - Reforestation"[26] ditayangkan di berbagai negara seperti Jerman, Perancis, Belanda tahun ini; salah satu "Letter to Stakeholders" APP; "Declaration of APP" diterbitkan di harian South China Morning Post pada 31 Agustus 2011; dan iklan APP diterbitkan di suratkabar Belanda pada 31 Maret 2011 (iklan sama diterbitkan di Itali, Perancis, AS, dan lainnya).*

2. Apa yang harus Diketahui Pelanggan tentang SMG/APP

2.1. SMG/APP terus melakukan penghancuran hutan alam skala besar secara tetap

Pada 2011, SMG/APP bertekad pada pelanggannya *"untuk mengambil suplai 100 persen pasokan kayu pulp dari stok perkebunan lestari hingga akhir tahun 2015*[27, 28]*".*

Dengan tekad ini, SMG/APP mengkonfirmasikan fakta tak terbantahkan bahwa perusahaan meneruskan pembabatan hutan alam tropis berskala besar dan tidak pilih-pilih di Sumatera. Masyarakat sipil masih mendokumentasikan banyak persoalan dihasilkannya, termasuk kehilangan keanekaragaman hayati serius, dan emisi gas rumah kaca yang luas, lebih bertahun-tahun, di antara yang lainnya bisa dilihat di http://www.eyesontheforest.or.id[29].

Eyes on the Forest memperkirakan hingga 2010 SMG/APP telah mengakibatkan hilangnya dua juta hektar hutan alam di Riau dan Jambi. Eyes on the Forest mendasarkan estimasi ini dari data SMG/APP sendiri[30], laporan-laporan oleh para peneliti[31] dan kalangan LSM (lihat Appendix 1).

2.2. SMG/APP berulangkali menunjukkan bahwa "komitmen"-nya terhadap kelestarian tidak dapat dipercayai

Pada dekade 1990an, pabrik pengolahan pulp APP, PT Indah Kiat berulang kali menyatakan bahwa perkebunan akan memasok *"secara substansi semuanya"* dari persyaratan kayu pabrik pengolahan 2004[32].

Setelah membatalkan komitmennya di awal 2004, APP menambah batas akhir "100% perkebunan"-nya hingga 2007[33].

Setelah menggagalkannya lagi pada 2007, APP kemudian menambah batas akhir "100% perkebunan"-nya hingga 2009[34].

Pada 2009, APP sekali lagi melanggar janjinya kepada para pembelinya. Tahun ini, 2011, perusahaan lagi-lagi mengulur batas akhir "100% perkebunan"-nya hingga 2015[35].

Eyes on the Forest tidak meyakini bahwa SMG/APP akan memenuhi batas akhir 2015. Perusahaan akan harus meneruskan penebangan hutan alam karena ia perlu memasok tidak hanya pabrik pengolahan pulp yang ada sekarang, namun juga setidaknya dua pabrik pengolahan yang baru yang sedang diiklankannya.

SMG/APP tidak memiliki pasokan kayu perkebunan lestari bagi pabrik-pabrik pengolahan pulp yang ada karena secara sejarah memiliki pengembangan perkebunan yang payah dan terlalu tingginya ketergantungan pada perkebunan yang berada di lahan gambut dan di dalam kawasan berkonflik dengan masyarakat[36, 37, 38]. Para ilmuwan telah menyatakan bahwa pengembangan perkebunan di lahan gambut dianggap sangat tidak lestari[39, 40, 41]: pembukaan gambut terus menerus akan membawa kepada kehancuran hanya setelah sedikit rotasi dan – jika gambut terletak dekat pantai seperti di Sumatera – konsesi-konsesi akan digenangi oleh air laut. Eyes on the Forest menghitung bahwa 77% (hampir 760.000 hektar) dari semua kawasan konsesi pemasok kayu SMG/APP di Riau saja berada di lahan gambut. Pemasok kayu SMG/APP memiliki banyak konsesi lagi pada lahan gambut di luar Riau. Semuanya, tidak lama lagi di masa depan, akan berhenti memasok kayu bagi perusahaan.

Di awal 2011, *Bisnis Indonesia* melaporkan bahwa SMG/APP akan mengembangkan 500.000 hektar perkebunan akasia di Papua dan dua pabrik pengolahan pulp di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan dengan kapasitas produksi pulp tahunan sebesar 2 juta ton masing-masingnya hingga 2017[42, 43]. Namun, SMG/APP belum menampakkan eksistensi pasokan kayi perkebunan lestari bagi pabrik-pabrik pengolahan pulp baru. Akan banyak dan semakin banyak hutan alam akan dibabat agar bisa mengoperasikannya.

2.3. SMG/APP mengakibatkan hilang dan musnahnya keanekaragaman hayati

Eyes of the Forest menganalisa data konsesi pemerintah dan analisis pengindraan jarak jauh EoF sendiri serta investigasi lapangan dari hampir 1,2 juta hektar konsesi perusahaan terkait SMG/APP di hampir kawasan kajian Riau (Peta 1) mencakup

- Hampir 940.000 hektar konsesi HTI (hutan tanaman industri) dan sekitar 45.000 hektar konsesi penebangan selektif (HPH) dibolehkan penebangan (PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) di Riau yang memasok atau mungkin memasok kayu keras tropis (MTH) kepada pabrik pengolahan pulp PT Indah Kiat, milik APP di Riau; serta
- Hampir 200.000 hektar konsesi HTI di lansekap Bukit Tigapuluh di Jambi[44] yang memasok dan mungkin memasok MTH kepada pabrik pengolahan APP di Jambi, PT Lontar Papyrus.

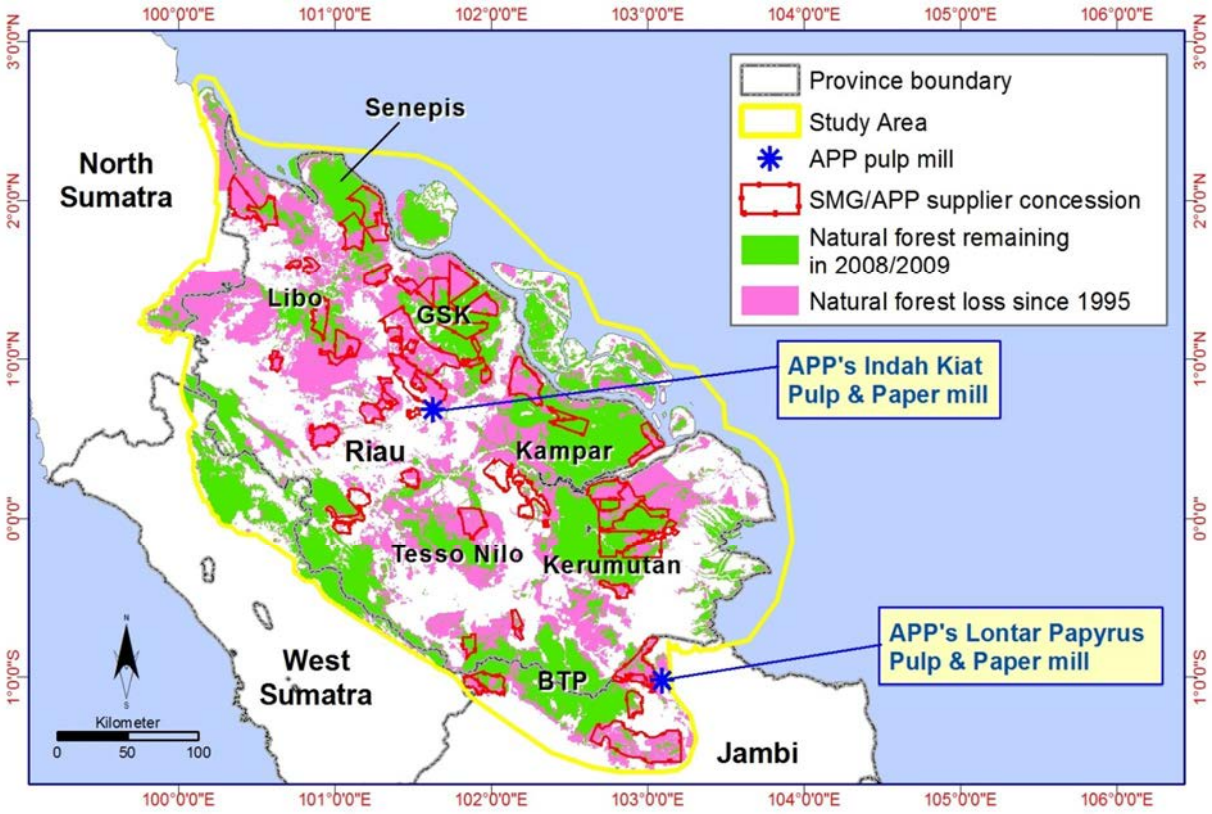

Peta 1. *Konsesi perusahaan terkait SMG/APP, hutan alam tersisa pada 2008/2009 dan hutan alam yang hilang sejak 1995 dalam kawasan kajian Eyes on the Forest.*

Antara 1995, ketika pemasok kayu SMG/APP mulai mendapatkan izin konsesi, dan 2008/2009, tahun terakhir dimana Eyes on the Forest menganalisa data-data ini (Peta 2, Appendix 2) [45], pemasok kayu SMG/APP

- mengakibatkan kehancuran sekitar 320.000 ha dan 355.000 ha jenis hutan terancam punah kritis dan hutan terancam punah, masing-masingnya.
- Mengakibatkan kehancuran sekitar 550.000 ha hutan jelajah harimau, 240.000 ha hutan jelajah gajah dan 1.500 ha hutan jelajah orangutan. IUCN mendaftarkan semua tiga spesies ini sebagai terancam punah secara kritis[46].

Operasi-operasi SMG/APP dalam konsesi yang diketahui terkaitnya di dalam wilayah kajian masih mengancam

- Sekitar 100.000 ha hutan terancam punah kritis dan 210.000 ha hutan jenis terancam punah, serta
- sekitar 320.000 ha hutan jelajah harimau, 120.000 ha hutan jelajah gajah dan 2.000 ha hutan jelajah orangutan.

Bagaimanapun ini hanya sepenggal dari satu kisah. APP menyatakan bahwa *"Pemasok kayu pulp APP mengelola 2,5 juta hektar lahan secara umum[47]".* Itu lebih dari dua kali yang dianalisa Eyes on the Forest untuk laporan ini. Selain itu, SMG/APP tengah membuat pulp kayu MTH di luar lahan yang mereka kelola. Dampak oleh perusahaan ini dan kehancuran hutan alam tropis adalah jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan disini yang berdasarkan pada kawasan kajian terbatas.

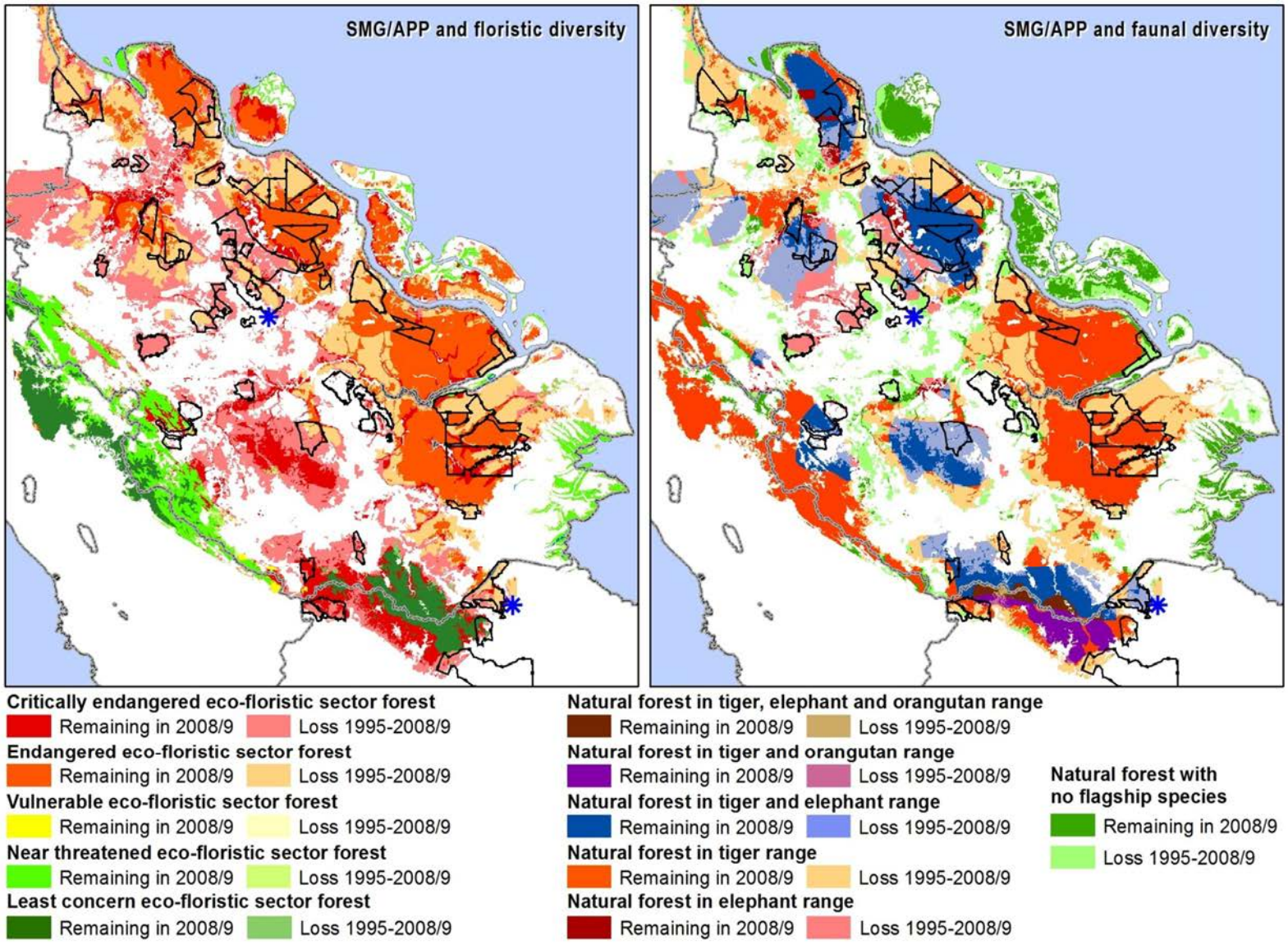

Peta 2. *Konsesi SMG/APP dan hutan alam yang hilang di antara pertengahan 1990s dan 2008/2009 yang tampak dengan sektor berbeda kawasan antara keanekaragaman eko-floris dan resiko kepunahan masing-masingnya*[48] *(kiri) dan jelajah harimau Sumatera, gajah dan orang utan (kanan).*

Para pemasok kayu SMG/APP sedang membabat tujuh dari delapan lansekap hutan alam yang ada di provinsi Riau (Peta 1 & 2).

Tesso Nilo adalah blok tersisa terakhir dari jenis hutan dataran rendah kering yang terancam punah kritis, yang kehilangan lebih dari 90% tutupan asli di pulau sejak 1985[49]. Ia memiliki salah satu tingkatan keanekaragaman tanaman vaskular tertinggi dunia[50] dan adalah rumah bagi harimau dan gajah Sumatera terancam punah serta banyak spesies lainnya[51]. SMG/APP tengah mengambil bahan kayu tropis dari konsesinya dan pihak ketiga termasuk dari para pembalak liar (pada 2003[52]) yang beroperasi di kawasan ini. Terlepas dari status sangat terancam hutan alam ini dan satwaliarnya, SMG/APP terus menebang bahkan hutan alam terakhir yang tersisa di konsesi-konsesinya di Tesso Nilo, yang mengancam kepunahan secara kritis harimau yang berada di sini[53].

Libo termasuk rawa air tawar terancam punah kritis dan hutan rawa gambut terancam punah, yang kini terfragmentasi sekali karena pembabatan hutan alam yang marak oleh SMG/APP, APRIL dan para pengembang perkebunan kelapa sawit. Libo adalah habitat harimau Sumatera dan gajah, keduanya sangat terancam oleh konflik manusia-satwaliar[54].

Senepis, Giam Siak Kecil, Kampar dan Kerumutan adalah blok-blok rawa air tawar terancam punah kritis dan hutan rawa gambut terancam punah, yang dihancurkan oleh pembukaan lahan gambut SMG/APP dan pembabatan hutan alam[55]. Mereka adalah habitat harimau Sumatera dan memiliki ramin yang dilindungi CITES dan fauna serta flora terancam punah lainnya. Tahun 2011, SMG/APP masih terus mengambil kayu keras tropis dari Senepis, Kerumutan dan Kampar (lihat Bab 3).

Bukit Tigapuluh termasuk jenis hutan dataran rendah kering terancam punah kritis yang telah kehilangan sekitar 80% dari tutupan aslinya di pulau ini sejak 1985[56]. Para ilmuwan internasional mempertimbangkan ini sebagai salah satu dari 20 lansekap penting di dunia bagi keberlangsungan harimau[57], dan Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai prioritas konservasi harimau teratas[58]. Hutan-hutan adalah habitat dua dari kantong terbesar yang tersisa dari gajah Sumatera dan satu-satunya populasi pelepasliaran berhasil dari orang utan Sumatera. Dari Februari ke April 2011, kamera-kamera pemicu gerak yang dipasang oleh Kementerian Kehutanan dan WWF di blok hutan seluas 20.000 hektar di lansekap ini merekam 12 individu harimau, termasuk dua ibu dan setidaknya empat ekor anak harimau[59]. SMG/APP secara sistematis menargetkan hutan bagus di kawasan ini bagi produksi pulp[60, 61, 62]. Analisa sejarah deforestasi sekitar “Hutan 12-Harimau” ini antara 2000 dan 7 Mei 2011 mengungkapkan bahwa penyusutan cepat habitat hutan yang ada karena penebangan hutan alam oleh SMG/APP dan pesaingnya APRIL. Perambahan besar-besaran diakibatkan oleh jalan logging masif SMG/APP yang menembus hutan tegakan lansekap (Peta 3). Keduanya yang menyusutkan populasi harimau di kawasan itu menjadi perca-perca kecil hutan alam (lihat Bab 3).

Foto 1 & 2. *Dua ekor anak harimau bermain-main dengan dedaunan kering (kiri) dan ibu harimau bersama dua anaknya (kanan)*[63].

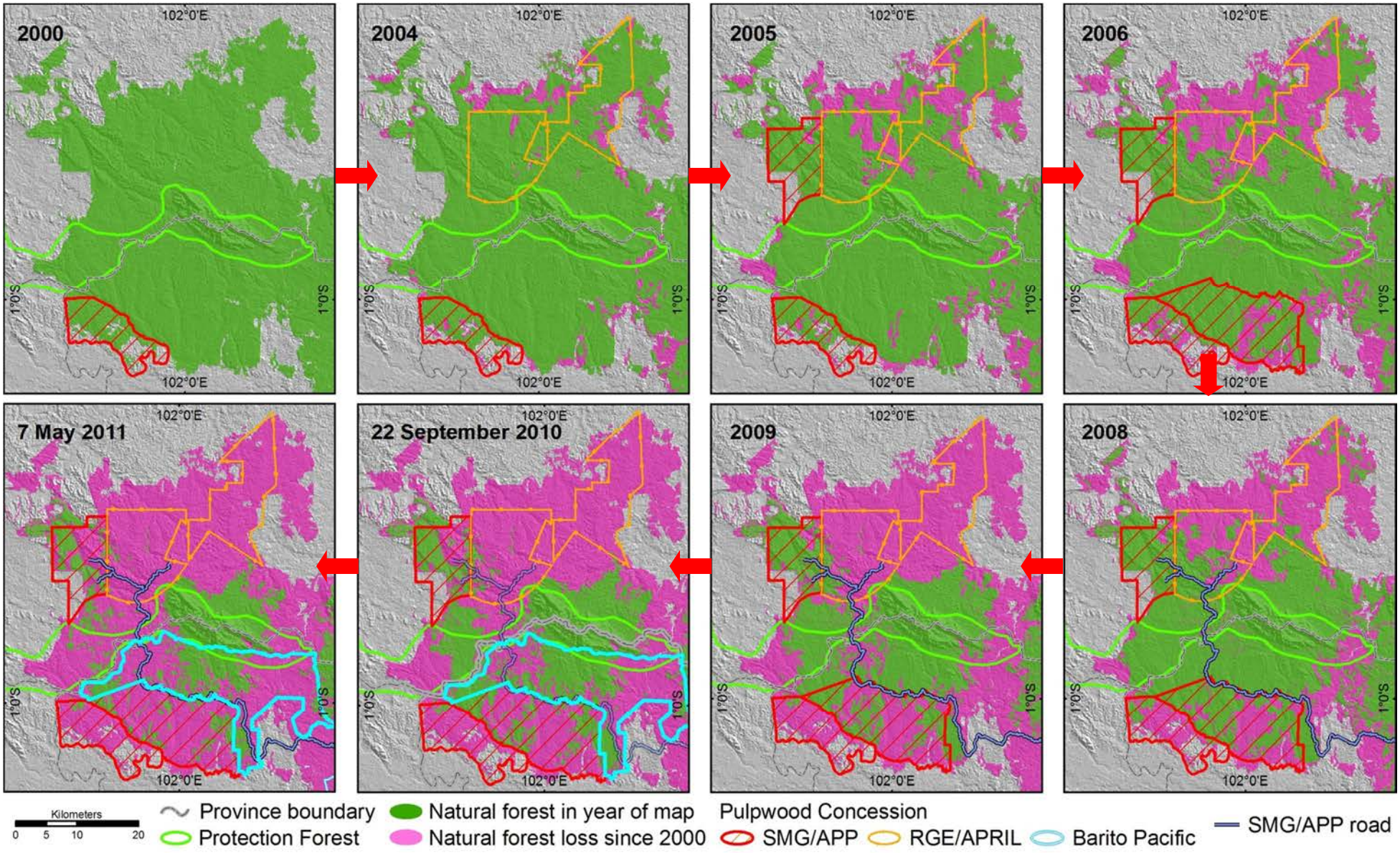

Peta 3. *Deforestasi di kawasan "Hutan 12 Harimau" di Bukit Tigapuluh antara 2000 dan 2011 berdasarkan citra satelit Landsat dan SPOT, memperlihatkan konsesi-konsesi SMG/APP dan APRIL serta jalan logging SMG/APP.*

2.4. SMG/APP mengeluarkan sejumlah besar karbon ke atmosfir, tapi melaporkan hal yang berlawanan

Antara pertengahan 1990-an dan 2008/2009 (Peta 4), pemasok kayu SMG/APP di wilayah kajian

- mengakibatkan kehancuran sekitar 370.000 hektar hutan alam tropis dengan sedikit kanopi tertutup (tutupan kanopi kisaran 70-100%) dan 210.000 hektar dengan kanopi terbuka sedang (40-70%), bersamaan terdiri dari 85% dari semua kehilangan hutan di dalam konsesi-konsesi mereka (Peta 4, kiri).
- Mengakibatkan kehancuran sekitar 80.000 hektar dan 170.000 hektar hutan alam tropis pada kedalaman gambut 2-4 meter dan lebih dari 4 meter kedalaman gambut, masing-masingnya, membuka lahan gambut setidaknya di tiga wilayah ini dan mungkin lebih banyak (Peta 4, kanan). Penebangan hutan alam pada gambut lebih dari 3 meter kedalaman melanggar peraturan Pemerintah (lihat Bab 3, Contoh 3).

Kalkulasi emisi karbon siklus kehidupan produk penuh dari produk-produk SMG/APP, termasuk emisi dari kehilangan hutan alam dan pembukaan gambut, menemukan footprint karbon produksi kertas APP di Sumatera ada dalam kisaran 16 – 21 ton CO_{2e} per ton kertas[64], 550 – 700 kali lebih tinggi daripada 0,03 ton yang dipublikasikan oleh konsultan didanai APP, Environmental Resource Management[65] dan sekitar 10 kali footprint karbon sektor pulp dan kertas di Amerika Utara[66]. Kajian lebih jauh menyimpulkan bahwa total emisi pabrik pengolahan pulp dan konsesi hutan APP di Indonesia adalah 67 – 86 juta ton CO_{2e}, menempatkan perusahaan APP Sinar Mas Group di atas emisi tahun 2006 dari 165 negara seluruh dunia[67].

Sejak 2000, pasokan kayu SMG/APP berasal utamanya dari penebangan hutan alam di kawasan gambut[68], seperti di lansekap Senepis, Libo, Giam Siak Kecil, Kampar dan Kerumutan, yang memiliki ketebalan gambut sangat dalam dengan lebih daripada 5.000 ton per hektar karbon. Pembukaan cepat lahan gambut di Riau oleh industri kertas memungkinkan penebangan hutan alam mereka mengakibatkan lahan gambut beroksidasi dan mengemisi karbon yang tersimpan selama ribuan tahun. Pembukaan gambut dalam Riau oleh SMG/APP dan pelumatan hutan alam oleh kelompok perusahaan itu adalah dua alasan paling signifikan bagi posisi provinsi ini sebagai nomor satu pengemisi karbon di Indonesia[69].

Pulau Sumatra jelas jadi yang terunggul dalam hal LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry/tata ruang, perubahan tata ruang, dan kehutanan) terkait dengan emisi CO_2 di Indonesia dengan 1,22 gigaton per tahun[70], dimana Riau berandil bagi sekitar 60 persen[71]. Banyak dari emisi yang dihasilkan oleh SMG/APP dan pesaingnya APRIL lewat “Mega Pulp Project” yang secara mantap dan diam-diam mencaplok lahan gambut di pulau, terutama di Riau namun juga di provinsi-provinsi lainnya sejak 2000-an. Baru total 2,2 juta hektare konsesi-konsesi sekarang, pada gambut lebih dalam, dengan pembukaan lebih cepat dan terus berekspansi, “Mega Pulp Project” di Sumatera adalah bencana iklim yang sedang terjadi, jauh lebih buruk daripada yang tersohor dan lama tidak aktif, “bekas Proyek Sejuta Hektar Lahan”[72]).

Antara 1990 dan 2007, Riau kehilangan lebih dari 4 juta hektar hutan alam, 44% di antaranya di lahan gambut. Emisi CO_2 tahunan Riau rata-rata berasal dari hilangnya hutan alam dan pembukaan gambut yang diperkirakan sebesar 0,22 gigaton, seperempat (24 persen) dari target pengurangan emisi gas rumah kaca tahunan kolektif pada semua negara-negara komitmen Kyoto periode 2008-2012[73].

Eyes on the Forest[74] memperkirakan SMG/APP dan APRIL memiliki lebih dari 800.000 hektar (31%) tegakan hutan tersisa Riau di konsesi mereka pada 2008/2009, terutama pada lahan gambut dalam. Jika mereka menebangi hutan-hutan ini dan membuka lahan gambut kaya

karbon itu untuk mengembangkan perkebunan kayu akasia, mereka mungkin menambah emisi tahunan Riau hingga 15 persen (bandingkan dengan tingkatan historis[75]) pada hampir 0,5 gigaton/tahun[76] - pada saat Presiden Yudhoyono bertekad mengurangi emisi karbon Indonesia hingga 26 persen (0,75 gigaton) dan Strategi Nasional REDD+ menargetkan pengurangan dari semua sektor kehutanan[77].

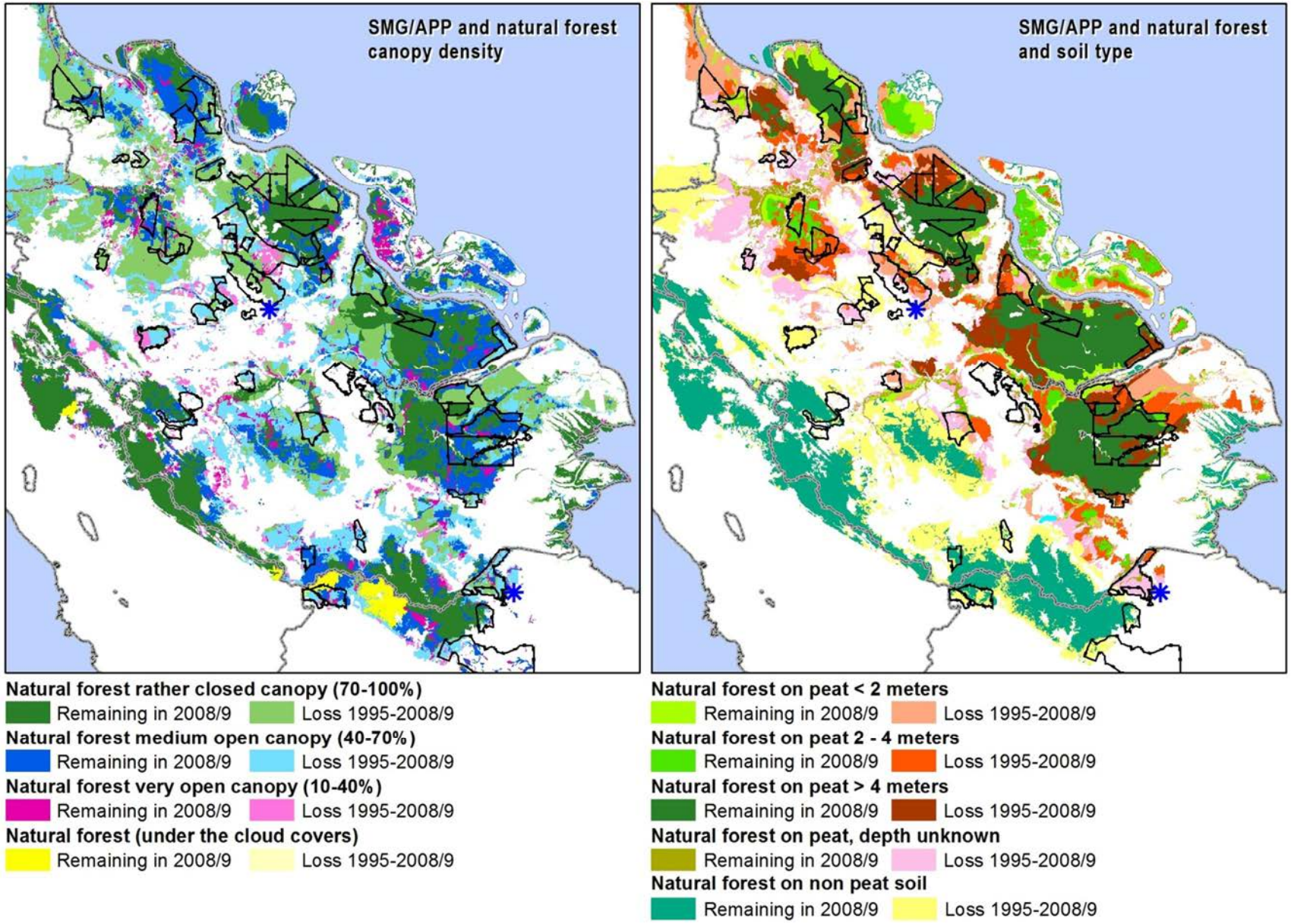

Peta 4. *Konsesi-konsesi pemasok kayu SMG/APP dan hutan alam yang hilang antara pertengahan 1990-an dan 2008/2009, dikaitkan dengan kepadatan kanopi*[78] *(kiri) dan jenis lahan – lahan bukan gambut dan lahan gambut pada kedalaman berbeda*[79].

3. APP peduli?

Iklan-iklan indah APP, siaran pers dan blog membanjiri pasar dunia. APP mengatakan kepada Anda:

- *"Kami di APP mengambil tanggungjawab kami sebagai pengawas lingkungan dengan sangat serius[80]".*
- *"APP selalu mengadopsi misinya mempertahankan kelestarian dalam operasinya[81]"*.
- *"APP peduli[82]"*.

Sebagaimana kampanye humas ini bergulir di seluruh dunia, SMG/APP sibuk membentuk jaringan pemasaran kuat di banyak negara dan pasar-pasar baru. Perusahaan siap membanjiri dunia dengan produk-produk deforestasi mengubah iklim.

Apa *sih* yang dipedulikan oleh APP? Terus menghancurkan hutan alam sebanyak mungkin dan memiliki banyak pelanggan sebanyak mungkin untuk membayarnya melalui komitmen konservasi palsu mereka, iklan-iklan dan kemitraan palsu.

WWF-Indonesia[83], Forest Stewardship Council[84], Rainforest Alliance[85], dan banyak pelanggan sebelumnya menghentikan berbisnis dengan APP ketika mereka menyimpulkan *engagement* konstruktif dengan APP guna menyelamatkan hutan alam adalah mustahil dan bahwa *engagement* apapun jika diteruskan akan memberikan perusahaan itu satu alasan untuk terus menghancurkan hutan Indonesia dan merusak lahan gambutnya (Box 1).

Box 1. Perusahaan yang menghentikan hubungan bisnis dengan APP.

Sejumlah perusahaan pelanggan telah menyimpulkan bahwa kebijakan menghancurkan lingkungan SMG/APP, khususnya deforestasi diakibatkannya tidaklah sesuai dengan nilai-nilai perusahaan mereka dan telah membuat komitmen publik untuk menghentikan hubungan bisnis dengan APP: Office Depot[86], Staples[87],Kraft[88], United Stationers[89], Target[90], Mattel[91] dan Hasbro[92] (AS); Idisa Papel (Spanyol)[93]; Metro Group[94], KiK[95], Adidas[96], Montblanc[97] dan Tchibo[98] (Jerman); Woolworths[99], Coles[100] dan Metcash[101] (Australia); The Warehouse[102] (Selandia Baru); Robert Horne Group[103], Tesco[104], Sainsbury[105] dan Marks & Spencer[106] (UK); Nestlé[107] (Swiss); Unilever[108] (Belanda); Ricoh dan Fuji Xerox[109] (Jepang); Zhejiang Hotels Association[110] (China); Gucci Group[111], Cartamundi[112] (Italia); Lego[113] (Denmark); Leclerc[114] (Perancis). Carrefour[115] (Perancis) baru saja mengonfirmasikan mereka akan berhenti membeli kertas dari APP bagi produk merek mereka sendiri.

Pemilik SMG/APP tidak hanya bisa berkomitmen, namun juga harus membuktikan melalui verifikasi independen oleh kelompok masyarakat sipil, bahwa mereka menghentikan semua penebangan hutan alam di dalam seluruh wilayah operasinya. Eyes on the Forest merekomendasikan konsumen untuk tidak pernah percaya dengan greenwashing SMG/APP dan mitra pemasaran mereka yang sederhana mencoba mengaburkan dan membingungkan dengan taktik sederhana:

1. Mereka mengeksploitasi kepolosan Anda, kekurangpengetahuan atau pengalaman tentang Indonesia, guna menyesatkan Anda untuk berpikir bahwa isu-isu yang diangkat kelompok sipil tidaklah benar.
2. Mereka menyorot komitmen, prestasi, upaya dan jasa yang tidak relevan guna mengalihkan perhatian Anda dari informasi krusial yang akan mempengaruhi keputusan pembelian Anda: bahwa SMG/APP terus mengakibatkan penebangan gambut skala besar dan penebangan hutan alam yang tanpa pilih di Sumatera dan ia pun memulai hal yang sama di Kalimantan dan Papua.

Pada 28 Oktober 2011, Komisi Etik Periklanan Belanda memutuskan iklan televisi dan suratkabar milik APP yang mengupayakan posisi APP sebagai perusahaan yang peduli dengan lingkungan dianggap menyesatkan publik[116]. Hal ini ditunjukkan dalam Bab pertama di atas.

Contoh 1. APP menyesatkan Anda untuk berpikir bahwa mereka adalah perusahaan melindungi satwa harimau.

APP menulis:

"kami mendukung program pelestarian 106.000 hektar suaka margasatwa Senepis, 10.000 hektar cagar Taman Raja, 172.000 hektar cagar Giam Siak Kecil, yang diakui oleh Program Manusia dan Biosfir UNESCO, serta program orangutan Kutai.[117]*"*

"Anda hanya menyelamatkan seekor harimau, orang bilang kepada saya. Itu tidak benar. Sejak saya bergabung dengan perusahaan ini pada 2004, kami telah berhasil mengamankan sejumlah habitat konservasi Harimau Sumatera. Pertama adalah suaka harimau Senepis di Dumai, Riau. Kedua, adalah Cagar Biosfir Giam Siak Kecil yang disetujui UNESCO. Yang ketiga adalah Cagar Alam Taman Raja di Jambi. Keempat adalah kawasan konservasi Kampar. Selanjutnya? Anda tinggal tunggu dan lihat.[118]*"*

Faktanya adalah:

Kebanyakan dari wilayah proyek yang mereka klaim dilindungi telah dilindungi oleh undang-undang atau dikelola oleh orang lain, karena itu SMG/APP tidak memberikan keuntungan konservasi bagi harimau. APP telah menghancurkan lebih banyak habitat harimau SETIAP tahun daripada lahan gabungan pada penyisihan sebenarnya dan dipersyaratkan hukum dalam konsesi-konsesi itu. Para pemasok kayu mereka telah membabat lebih banyak hutan yang aslinya diusulkan Pemerintah sebagai Taman Nasional Senepis untuk konservasi harimau, dan telah memulai penebangan bahkan pada blok hutan secuil yang dikomitmenkan dulunya oleh SMG/APP untuk dilindungi di dalam apa yang diusulkan "Suaka Harimau Senepis", dan telah membuka dan menebangi hutan gambut di dalam Cagar UNESCO.

Bertahun-tahun, APP menyorot "proyek-proyek" yang sama guna mengalihkan perhatian dari penghancuran hutan harimau skala besar di Sumatera, di dalam lansekap di mana "proyek-proyek" ini berada dan bahkan di dalam "proyek" mereka sendiri.

LSM-LSM telah menunjukkan bahwa SMG/APP tidaklah peduli dengan harimau dan "proyek-proyek" yang mereka iklankan.

- Kontribusi nyata APP bagi "proyek-proyek" dan nilai "proyek-proyek" mereka sendiri bagi konservasi secara serius dapat dipertanyakan karena sebagian besar kawasan ini sudah dilindungi secara hukum atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan lainnya.
- Pemasok kayu SMG/APP tengah menebangi begitu banyak hutan alam di Senepis, Giam Siak Kecil, Kampar dan Bukit Tigapuluh (Taman Raja terletak) yang ini mengancam viabilitas ekosistem keseluruhan dan keanekahayati mereka, sebagaimana juga proyek-proyek mereka sendiri di dalamnya dan harimau-harimau yang mereka klaim untuk dilindungi.

Di Riau dan Jambi, Dokumen-dokumen makro-mikro delineasi yang disyaratkan Pemerintah serta rencana kerja 31 pemasok kayu APP dan APRIL mencakup 1,52 juta hektar yang menunjukkan bahwa hanya 50.709 hektar yang dizonakan sebagai "Zona Perlindungan Satwaliar" yang disyaratkan Pemerintah dan dari hutan itu, hanya 3.850 hektar yang dipersiapkan oleh APP secara spesifik bagi konservasi harimau di Senepis[119]. Hal bertentangan, kajian kami menemukan bahwa pemasok kayu SMG/APP telah menghancurkan 550.000 hektar hutan harimau di antara 1995 dan 2008/2009 pada wilayah kajian kami saja dan sepertinya membuat lebih banyak hilangnya hutan harimau di luar wilayah tersebut.

SMG/APP mempromosikan pemindahan harimau sebagai salah satu prestasi konservasinya[120] [121]. Pada kenyataannya, APP tidak melakukan apapun lagi selain daripada mendanai keluarnya harimau setelah perusahaan itu menghancurkan habitatnya yang mendorong adanya konflik

satwa dan manusia; tidak satupun konflik akan terjadi jika perusahaan melindungi hutan-hutan harimau ini[122].

Di Senepis (Peta 5), SMG/APP masih terus mengambil bahan baku kayu dari hutan alam di lima konsesi[123]. Pada 2004, Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang didukung Gubernur Riau mengusulkan satu Taman Nasional bagi konservasi harimau di Senepis yang termasuk konsesi pemasok kayu SMG/APP, PT. Suntara Gajapati (SGP)[124]. Investigasi WWF[125] mengungkapkan bagaimana SMG/APP tampaknya mencegah habitat harimau dilindungi seperti pada usulan Taman Nasional Senepis. Konsep taman nasional tiba-tiba hilang. Sebagai gantinya, APP mulai mengiklankan alternatifnya sendiri, 106.081 hektar "Suaka Harimau Senepis"[126]. Secara misterius, kawasan yang akan dilindungi secara besar-besaran dikeluarkan dari konsesi PT. Suntara Gajapati ke dalam konsesi milik perusahaan tak terkait dengan grup itu, PT. Diamond Raya Timber, yang memiliki operasi bersertifikasi FSC dan telah sepenuhnya melindungi hutan harimau ini. Pada 2011, investigasi Greenomics[127] menunjukkan bahwa delineasi makro dan mikro yang dipersyaratkan pemerintah serta rencana kerja PT. Suntara Gajapati dari grup SMG/APP mengalokasikan hanya 3.850 hektar, lebih kecil daripada 4%, kepada suaka harimau APP. Daripada berkontribusi kepada perlindungan habitat harimau dengan menyuruh konsesi PT SGP mendeklarasikan taman nasinal harimau, pemasok kayu APP secara sistematis membasmi habitat harimau Senepis di konsesi PT SGP dan pemasok lainnya, konsesi-konsesi PT Ruas Utama Jaya (RUJ) dengan menebangi hutan alam pada gambut menyatu berkedalaman lebih dari 4 meter. Hingga Juni 2011, RUJ menebangi blok kecil hutan alam (kurang dari 5.000 hektar) yang APP telah sisihkan untuk "Suaka Harimau Senepis"-nya sendiri (Peta 5 dan Foto-foto 3-5).

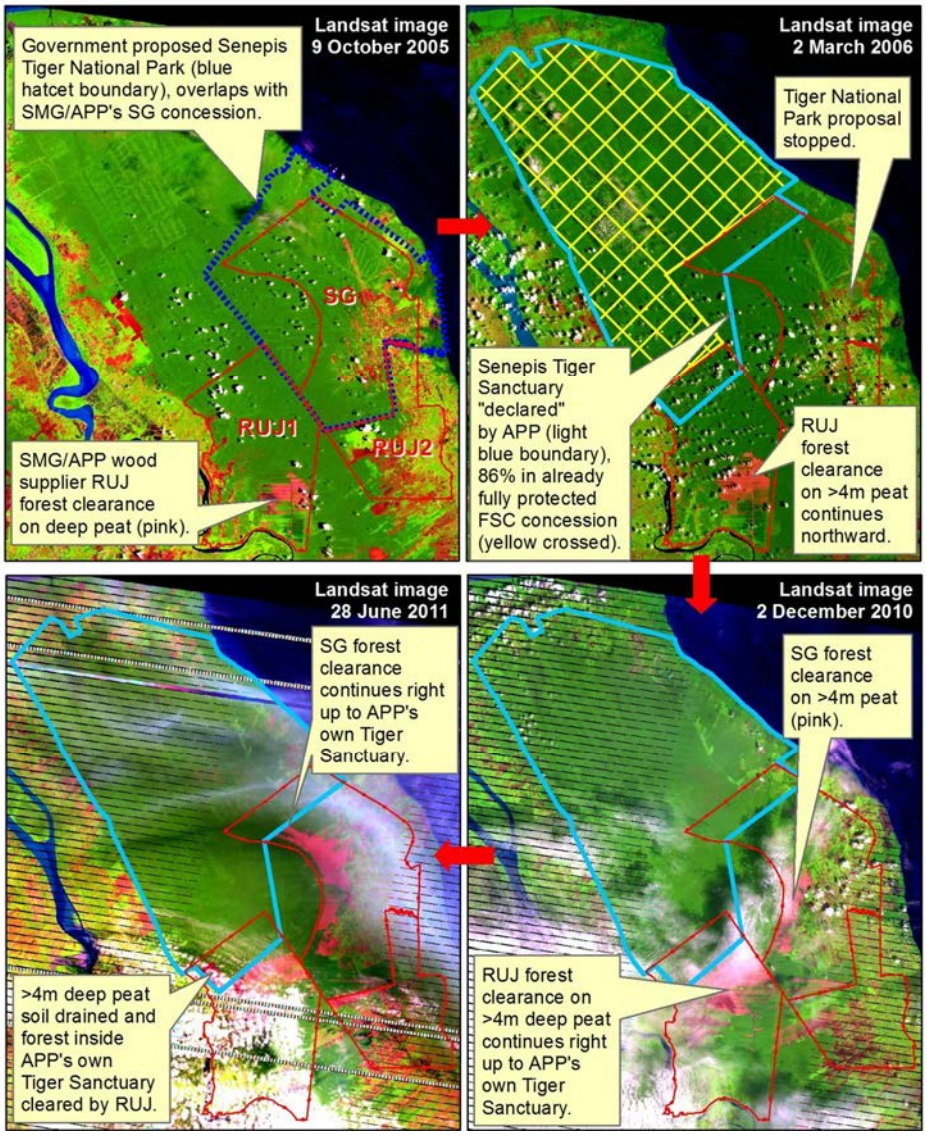

Peta 5. Suaka harimau Senepis yang dideklarasikan APP sendiri dan sejarah penebangan hutan alam oleh APP di gambut dalam.

Foto-foto 3-5. *Pembukaan gambut dan penebangan hutan alam skala besar oleh pemasok kayu APP, PT Ruas Utama Jaya, di dalam Suaka Harimau Senepis oleh APP pada Juni dan Oktober 2011. Peta-peta dengan panah dekat nomor foto di peta (kanan atas) menunjukkan arah foto diambil.*

Pada 2009, Eyes on the Forest melaporkan bahwa insiden paling keras melibatkan manusia dan harimau di Provinsi Riau sejak 1997 yang terjadi dekat hutan yang ditebangi oleh SMG/APP. Analisa, berdasarkan data konflik manusia-harimau yang dipublikasikan, menemukan setidaknya 147 dari 245 atau 60% dari semua konflik di Riau mengakibatkan tewasnya 27 jiwa manusia (49%) dan 8 ekor harimau (53%), yang terjadi di kawasan Senepis saja[128]. Namun tidak hanya harimau yang menderita dari penghancuran habitat yang tak pernah henti oleh SMG/APP. Semua penebangan hutan SMG/APP didahului oleh pembukaan gambut dimana hutan ini terletak, membuat viabilitas dan kelestarian ekosistem gambut keseluruhan ini jadi pertanyaan dan mengeluarkan jumlah besar emisi gas rumah kaca.

Bukit Tigapuluh – KKI Warsi, Eyes on the Forest dan LSM lokal yang bekerja di lansekap ini menunjukkan bagaimana SMG/APP secara sistematis menargetkan hutan alam bagus di Lansekap Konservasi Harimau Prioritas Global[129, 130, 131, 132] ini dan memperkirakan APP telah mengakibatkan hilangnya lebih dari 75.000 hektar hutan alam sejak 2004[133]. Pada 2009, APP mengumumkan "Cagar Alam Taman Raja" yang mencakup kurang dari 7.000 hektar hutan[134]. LSM menunjukkan sebagian besar hutan di "Cagar Alam Taman Raja" tidak boleh ditebang menurut peraturan di Indonesia[135, 136] dan cagar itu tidak bisa berfungsi sebagai "koridor satwaliar" sebagaimana diklaim oleh APP karena perusahaan telah menghancurkan hutan alam di sekitarnya.

Cagar Biosfir UNESCO Giam Siak Kecil, yang digambarkan oleh SMG/APP sebagai "program kunci konservasinya[137]", telah dilindungi sebelum pengumuman APP yang tanpa izin membuka lahan gambut dalam dan menebangi hutannya dengan rencana tata ruang lokal dan beragam peraturan. Mitra perusahaan SMG/APP mulai secara ilegal menebangi hutan alam rawa gambut di wilayah yang saat ini adalah zona penyangga cagar biosfir sebelum tahun 2000 tanpa izin memadai dari Kementerian Kehutanan[138]. Berdasarkan investigasi lapangan yang luas dan analisis satelit, Eyes on the Forest[139] menyimpulkan bagaimana APP terus menghancurkan ekosistem Giam Siak Kecil bahkan setelah Cagar Biosfir UNESCO dideklarasikan pada 2009, dengan membuka lahan gambut dalam dan menebangi hutannya serta berkontribusi bagi emisi karbon sangat besar dalam prosesnya. Sejumlah penebangan hutan dilakukan tanpa izin memadai dan sebagai hasil korupsi, yang terbuktikan dengan para pejabat daerah yang masuk penjara akibat mengeluarkan izin-izin tak sah[140]. Greenomics[141] menyatakan, *"Cagar Biosfir yang dikatakan itu tak lebih dari sekadar lansekap di tengah-tengah penebangan hutan dahsyat oleh para penyuplai perkebunan akasia APP."*

Di Semenanjung Kampar, SMG/APP telah membuka lahan gambut dalam dan menebangi hutan alam di lansekap ini sejak akhir 1990-an. Pada 2010, APP dan mitranya Carbon Conservation mulai "menjual" proyek kecil "Kampar Carbon Reserve"[142], memasarkannya juga sebagai proyek konservasi harimau. Eyes on the Forest dan Greenomics melaporkan bahwa proyek seharusnya tidak mendapatkan kredit karbon karena kawasan itu sudah dilindungi oleh hukum karena merupakan lahan gambut sangat dalam (tidak ada tambahan) dan bahwa SMG/APP sedang menebangi hutan dan membuka gambut di ekosistem menyatu ini (kebocoran besar), membuat emisi sejumlah besar karbon[143].

Contoh 2. APP menyesatkan Anda dengan pikiran bahwa APP tidak menggunakan kayu dari hutan alam dengan Nilai Konservasi Tinggi untuk produk yang dibuatnya.

APP menulis[1]:

"Para pemasok kayu APP mengoperasikan perkebunan kayu pulp berdasarkan konsesi

[1] Garis bawah pada kutipan APP dibuat oleh Eyes on the Forest.

legal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia di lahan yang diidentifikasi sebagai wilayah berhutan bernilai terendah di negara, terdiri dari bagian besar dengan apa yang dikategorikan sebagai rusak atau lahan telantar.[144]*"*

"Lebih baik daripada membakar residu kayu yang akan menghasilkan peningkatan emisi karbon atau meninggalkan residu pada lantai hutan yang berpotensi wabah penyakit di hutan, maka Pemerintah mensyaratkan bahwa benda ini bisa digunakan secara produktif seperti memproduksi pulp dan kertas.[145]*"*

"Sebelum pengembangan perkebunan lahan yang terkena sejumlah penilaian ekologis dan sosial guna menjamin adanya penilaian konservasi tinggi (HCV) teridentifikasi dan terlindung.[146]*"*

"Kami memantau dari dekat rantai pasok bagi produksi pulp dan kertas, guna menjamin tidak ada lagi kayu pulp dari wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV) seperti didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia yang digunakan dalam produk APP manapun."[147]

Faktanya:

APP menggunakan kayu dari penebangan hutan tropis lebat dan bagus di Sumatera, dengan Nilai Konservasi Tinggi yang didefinisikan Forest Stewardship Council, seperti harimau Sumatera yang terancam punah kritis dan hutan-hutan dataran rendah kering dan gambut yang terancam punah, serta diidentifikasikan oleh asesor independen berdasarkan HCV Toolkit Indonesia yang didukung multi-stakeholder.

APP tidak pernah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "*wilayah berhutan bernilai terendah*", "*rusak*" atau *"lahan telantar*". Perusahaan ingin para pelanggan membayangkan bahwa pasokan kayu mereka tengah memanen apa yang mereka sebut "residu kayu" dalam wilayah sangat terbuka dengan sangat sedikit pohon atau dengan "residu kayu" yang tergeletak di tanah ketika para pemasok kayu tiba di sana.

Dalam kenyataannya, citra satelit kami dan investigasi lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa para pemasok kayu SMG/APP menebangi hutan alam lebat dan bagus dengan Nilai Konservasi Tinggi (Peta 2, 3 dan 4)[148, 149, 150, 151, 152, 153, 154]. Bahkan rencana tebang tahunan pemasok kayu SMG/APP sendiri (disebut RKT), berdasarkan data perusahaan yang dikirimkan kepada Pemerintah, menunjukkan kepadatan pohon tinggi dengan volume kayu resmi rata-rata adalah 82 m^3/hektar pada 2009 (antara 31 dan 152 m^3/ha) dan 95 m^3/ha pada 2010 (antara 31 dan 164 m^3/ha)[155].

Meluruskan yang keliru: "Residu kayu" SMG/APP adalah hutan tropis sebelum pemasok kayunya meratakannya.

Apa yang tidak diceritakan oleh APP kepada Anda adalah Pemerintah Indonesia mengetahui hanya sedikit kawasan berupa "hutan primer" dalam peta resmi Sumatera-nya dan sebagian besar berada di dalam kawasan konservasi dan kawasan dengan kelerengan tajam. Mayoritas hutan alam yang pernah dizonasikan sebagai konsesi tebang pilih yang dinamakan "hutan sekunder", "hutan rusak", atau "hutan baru ditebangi" tanpa ada definisi ketat. Semua ini adalah hutan dataran rendah alam kering dan gambut dengan kanopi lebat seringkali dimana hanya pohon-pohon berdiameter besar yang bisa dipanen secara selektif di masa lalu. Mereka masih sangat kaya keanekaragaman hayati dan karbon[156], namun juga di bawah undang-undang saat ini dan peraturan, Pemerintah bisa mengeluarkan izin konsesi HTI dan membolehkan mereka untuk ditebangi.

Meluruskan yang keliru: Pemerintah Indonesia membolehkan penebangan hutan tropis lebat dengan nilai keanekahayati tinggi bagi konversi ke HTI. Untuk mengoperasikan perusahaan secara lestari, haruslah melindungi secara volunter Hutan Bernilai Konservasi Tinggi.

Apa yang tidak dikatakan oleh APP kepada Anda adalah bahwa perusahaan menolak membuat hutan alam secara independen dan transparan dinilai menggunakan definisi diadopsi secara global yakni HCVF oleh Forest Stewardship Council melalui penerapan Toolkit HCV Indonesia. APP menggunakan banyak kata-kata sama seperti *"kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) seperti didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia"* dan penerapan yang disyaratkan secara hukum "*penilaian ekologis dan sosial".* Namun ini berarti penilaian hutan berdasarkan persyaratan pemerintah dinamakan AMDAL dan delineasi makro-mikro yang memiliki penerapan di lapangan telah telat untuk melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi.

Pada tahun 2004, setelah desakan para pelanggan dan LSM, SMG/APP meminta Program SmartWood milik Rainforest Alliance (RA) untuk mengidentidikasi HCVF di tiga Unit Pengelolaan Hutan grup itu berdasarkan Toolki HCV Indonesia. Ketika diidentifikasi, SMG/APP berkomitmen melindungi dan mempertahankan semua HCVs. Namun, analisa serangkaian waktu dari citra satelit secara periodik mengungkapkan bahwa perusahaan itu tengah menebangi HCVF yang teridentifikasi secara independen dan transparan (wilayah garis kuning di Peta 6 dan 7). Semua tegakan hutan pada rawa gambut yang lebih dalam daripada 4 meter, dilindungi oleh hukum.

Meluruskan yang keliru: SMG/APP tidak melindungi secara transparan dan independen HCVF yang teridentifikasi, namun justru menghancurkannya untuk produksi kertasnya[157, 158]*.*

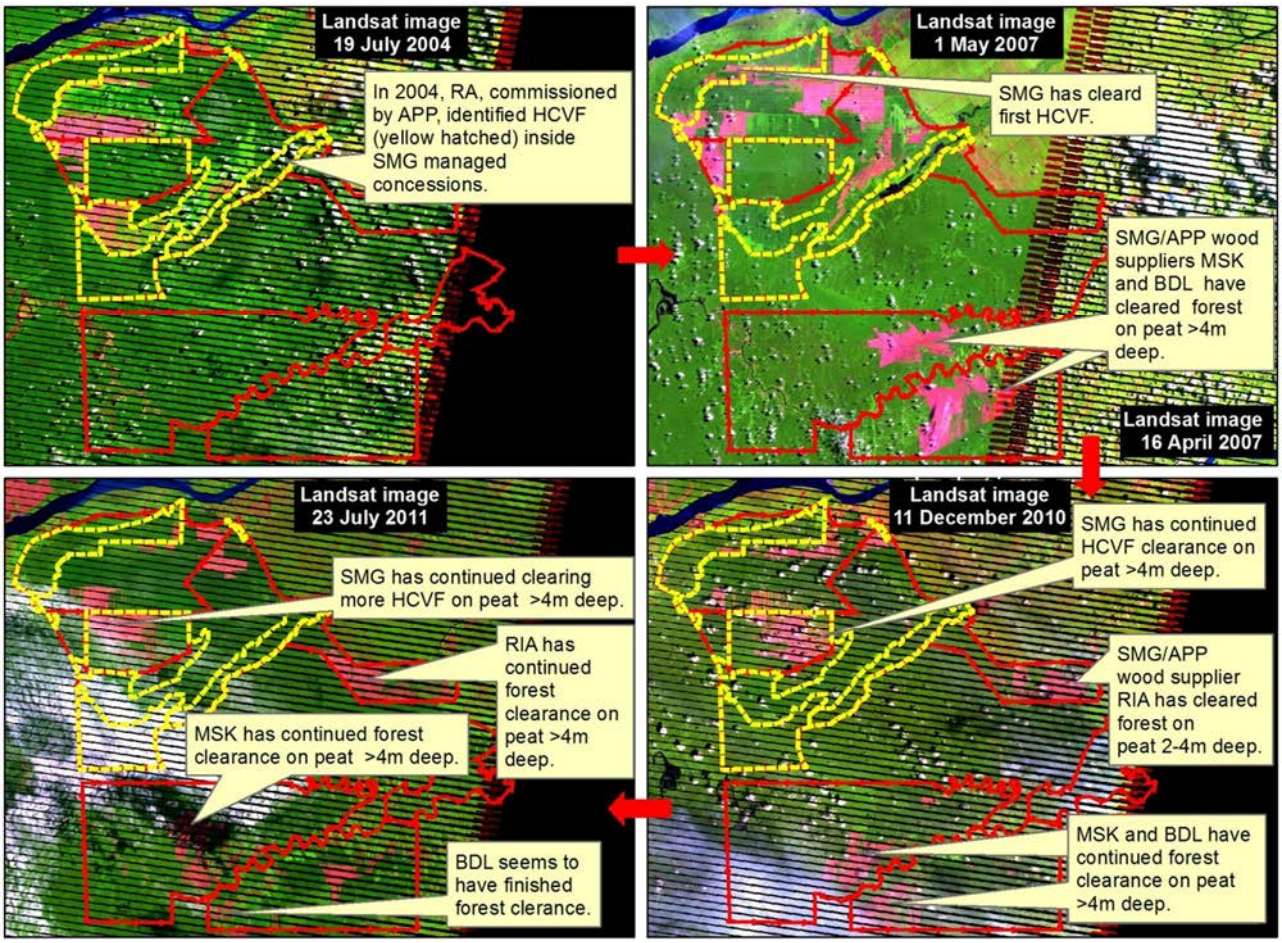

Peta 6. *Penebangan HCVF diidentifikasi Rainforest Alliance dan hutan alam lainnya pada gambut dalam di Kerumutan.*

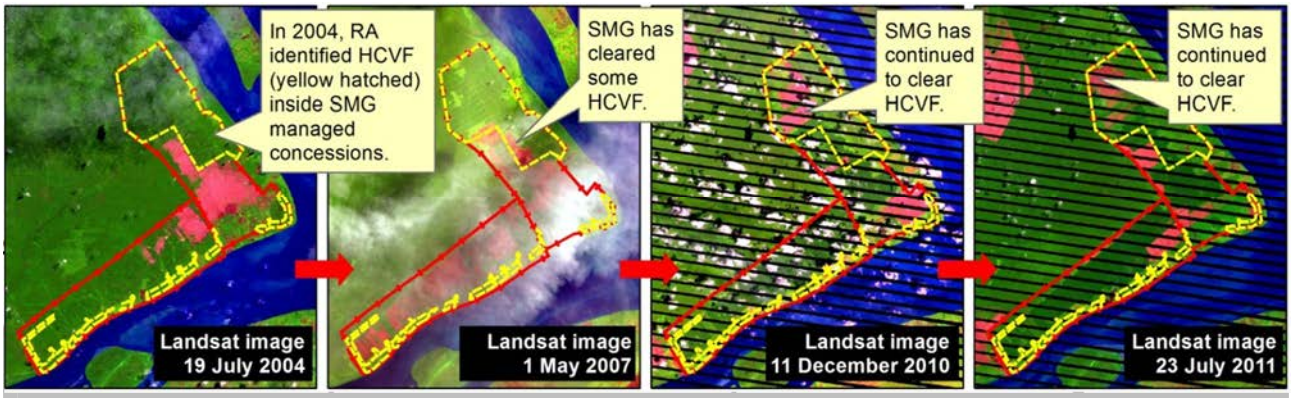

undang-undang dan peraturan dan yang menjamin mereka lestari dan pro-konservasi.

APP menulis:

"APP selalu secara ketat taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku dalam rangka menjamin bahwa semua produk pulp dan kertas kami berasal dari hutan dikelola sah dan lestari. [159]"

"Bagi industri pulp dan kertas Indonesia, pengelolaan hutan lestari dan konservasi dimulai dengan secara ketat mengikuti rencana tata ruang dan aturan pengembangan perkebunan oleh pemerintah Indonesia seperti halnya Persyaratan sertifikasi Pengelolaan Kehutanan Lestari. Standard-standard ini menjelaskan syarat untuk melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, pembatasan bagi pengembangan di lahan gambut, dan kerjasama dengan masyarakat dalam proses pengembangan perkebunan.[160]"

"APP memiliki kebijakan merangkul semua standard sertifikasi yang relevan kepada dan dalam mendukung kebijakan, undang-undang dan peraturan Indonesia dan kami akan selalu berusaha memperoleh standard tertinggi yang diharapkan oleh pelanggan dan mitra di seluruh dunia. Kami akan terus menggunakan standard dan prinsip dari sertifikasi global lainnya, termasuk TLTV, ecolabelling and PEFC yang internasional[161]".

Faktanya adalah:

Sejumlah investigasi lapangan dan analisa menunjukkan bahwa SMG/APP tidak menaati semua aturan dan perundangan yang berlaku dan penebangan hutan alam itu adalah opsi legal di Indonesia dengan SMG/APP terus terapkan.

Legalitas adalah persyaratan minimum bagi semua pelanggan. Banyak pelanggan menghendaki lebih dari sekadar ketaatan hukum, sebagai contoh, bersikukuh pada kelestarian, konservasi, dan deforestasi nol. Jadi, bahkan klaim APP bahwa ia *"selalu secara ketat taat kepada undang-undang dan peraturan berlaku"* tidaklah benar.

Apa yang tidak diceritakan oleh APP kepada Anda adalah:

- Banyak konsesi SMG/APP telah melanggar "*pembatasan bagi pengembangan di lahan gambut*" dari pemerintah dengan penebangan hutan alam pada gambut kedalaman lebih dari 3 meter [162], yang melanggar Keputusan Presiden Nomor 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya[163], UU Nomor 26/2007 tentang Tatas Ruang[164], saat ini rencana tata ruang nasional yang berlaku diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional[165].
- Salah satu laporan audit 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menyimpulkan bahwa pemasok kayu SMG/APP menebangi hutan alam berdasarkan izin HTI dan rencana kerja tahunan yang diterbitkan dianggap melanggar peraturan[166].

- Pemerintah Indonesia memenjarakan dua pejabat pemerintah (Tengku Azmun Jaafar dan Asral Rachman) karena kasus korupsi sewaktu mengeluarkan izin-izin kepada pemasok APP[167], dua lagi sudah ditahan (Arwin A.S dan Syuhada Tasman)[168] dan seorang lainnya, Burhanuddin Husein, masih disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[169]. Dengan izin-izin ini didapat melalui praktek korupsi, SMG/APP menebangi hutan alam guna memasok pabrik pengolahannya dan memproduksi kerta serta menjualnya ke seluruh dunia[170, 171, 172, 173, 174].
- Perubahan terbaru dalam aturan perundangan kehutanan membolehkan penebangan hutan alam, hal yang bertentangan dengan aturan perundangan yang pro-kelestarian dan pro-konservasi seperti yang terkait dengan pengembangan di lahan gambut dan para pemasok kayu itu mengeksploitasi kontradiksi ini guna membabat hutan alam sebanyak mungkin[175]. Perusahaan yang benar-benar bertanggungjawab dan lestari serta pro-konservasi akan lebih menghormati aspirasi dan niat aturan perundangan yang melindungi hutan-hutan ini. Dalam keadaan seperti itulah, legalitas tidaklah mewakili kelestarian ataupun konservasi.

APP mengangkat komitmennya kepada legalitas dengan melaksanakan "Timber Legality & Traceability Verification (TLTV)", jasa yang dikembangkan oleh SGS dalam mengadopsi "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)" [176, 177]. Bagaimanapun, seperti halnya "legalitas" dalam praktek tidaklah menjamin "pengelolaan hutan lestari" ataupun "konservasi", APP tidak memiliki basis dengan mengatakan: *"negara-negara luar mengimpor produk berbasis kayu dari Indonesia seharusnya memiliki keyakinan penuh bahwa produk-produk Indonesia disertifikasi di bawah panduan SVLK yang memenuhi standard tertinggi untuk legalitas kayu dan mendukung prinsip SFM. Standard-standard ini seharusnya diterima dan dianggap setara dengan persyaratan legal lainnya oleh negara-negara yang bermaksud melindungi hutan alam mereka sendiri dan mewajibkan praktek kehutanan lestari"*[178].

Apa yang tidak APP beritahukan kepada Anda adalah bahwa standard sertifikasi kehutanan paling kredibel di dunia, the Forest Stewardship Council (FSC), melepaskan dirinya dari kerjasama dengan Asia Pulp & Paper pada 2007. Dewan Direksi FSC menyatakan, *"Dewan Direksi FSC memutuskan bahwa keterkaitan dengan APP akan mengancam keinginan dan keyakinan luhur yang telah dibangun atas nama Forest Stewardship Council. [...] Ada informasi penting tersedia untuk publik bahwa APP, anak perusahaan Sinar Mas, dikaitkan dengan praktek kehutanan menghancurkan. Laporan-laporan dari WWF, Greenpeace, Eyes on the Forest dan banyak sumber independen lainnya menyatakan bahwa APP secara aktif melalukan praktek kehutanan yang berlawanan dengan Prinsip dan Kriteria FSC."*[179]

Sebagai hasilnya saat ini, APP tidak memiliki sertifikasi pihak ketiga yang independen, dan kredibel guna menunjukkan kelestarian mereka.

Badan-badan sertifikasi sering dikutip oleh APP – standard-standard Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Program Dukungan Sertifikasi Hutan (PEFC), dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/PHPL dari Pemerintah Indonesia[180] -- tidaklah menjamin kelestarian. Tidak ada dari mereka memiliki standard cukup komprehensif untuk memvalidasi[181, 182]:

1. Apakah SMG/APP terlibat/dilibatkan dalam HCVF dan kehancuran gambut di konsesi-konsesi masih jadi pertanyaan, dan
2. Apakah ada catatan kelestarian dan lingkungan menyeluruh serta permasalahan lingkungan dan sosial berskala besar yang diakibatkan oleh korporasi grup SMG/APP di luar sedikit konsesi kecil yang mereka sertifikasi.

Contoh 4. APP menyesatkan Anda dengan berpikir bahwa APP peduli dengan iklim dunia.

APP menulis:

"Kami juga musti mengenali bahwa industri swasta sama-sama bertanggungjawab dalam menggunakan masa moratorium untuk menilai dan meningkatkan praktek dan program pengelolaan kehutanan lestari internal.[183]*"*

"Pesan pentingnya adalah bahwa tidaklah cukup kita mengatakan kita mendukung moratorium. Yang jadi persoalan adalah tindakan. […] Sementara Asia Pulp & Paper akan mengambil tindakan menyatukan dengan moratorium dengan bisnis lebih sehat dengan visi jelas dan definitif bagi masa depan pengelolaan kehutanan lestari kami, produksi pabrik, konservasi dan program investasi sosial. [184]*"*

"Banyak daerah di Indonesia terdiri dari lahan belum diolah. Aforestasi adalah kemungkinan yang membuat lahan liar menjadi kawasan penangkap dan penyimpan CO_2 secara de facto. Indonesia adalah tempat fantastis untuk menanam pohon. Pemasok pulp APP menanam lebih dari 200 juta pohon per tahun.[185]*"*

Faktanya adalah:

APP pertama kali menghancurkan jutaan pohon tua dari ratusan spesies berbeda hingga menanam pohon muda dari satu spesies dan kemudian memotong setiap pohon yang ditanam selama 5-7 tahun kemudian. Hasilnya: emisi besar – tidak ada sequastrasi. Bahkan lebih menghancurkan bagi iklim, SMG/APP terus membuka lahan gambut sangat kaya karbon guna menghancurkan hutan-hutan mereka dan menanam tanaman monokultur, mengeluarkan jutaan ton karbon ke atmosfir yang mempengaruhi iklim dunia (Lihat juga Bab 2.3.).

Moratorium Indonesia terhadap deforestasi pada faktanya hanyalah moratorium dari penerbitan izin-izin baru pada apa yang dinamakan hutan primer dan lahan gambut yang izinnya belum pernah dikeluarkan[186, 187, 188, 189]. Ini maksudnya hanyalah sedikit sekali hutan Sumatera dilindungi dengan moratorium yang secara mendasar tidaklah ada dampaknya bagi SMG/APP (Peta 8). Dengan sedikit pengecualian, grup ini akan terus menghancurkan hutan alam dan membuka lahan gambut di konsesi mereka yang ada. APP bahkan bisa mendapatkan izin-izin untuk menebang hutan alam yang masih tersedia dan tidak tercakup oleh moratorium (Peta 8).

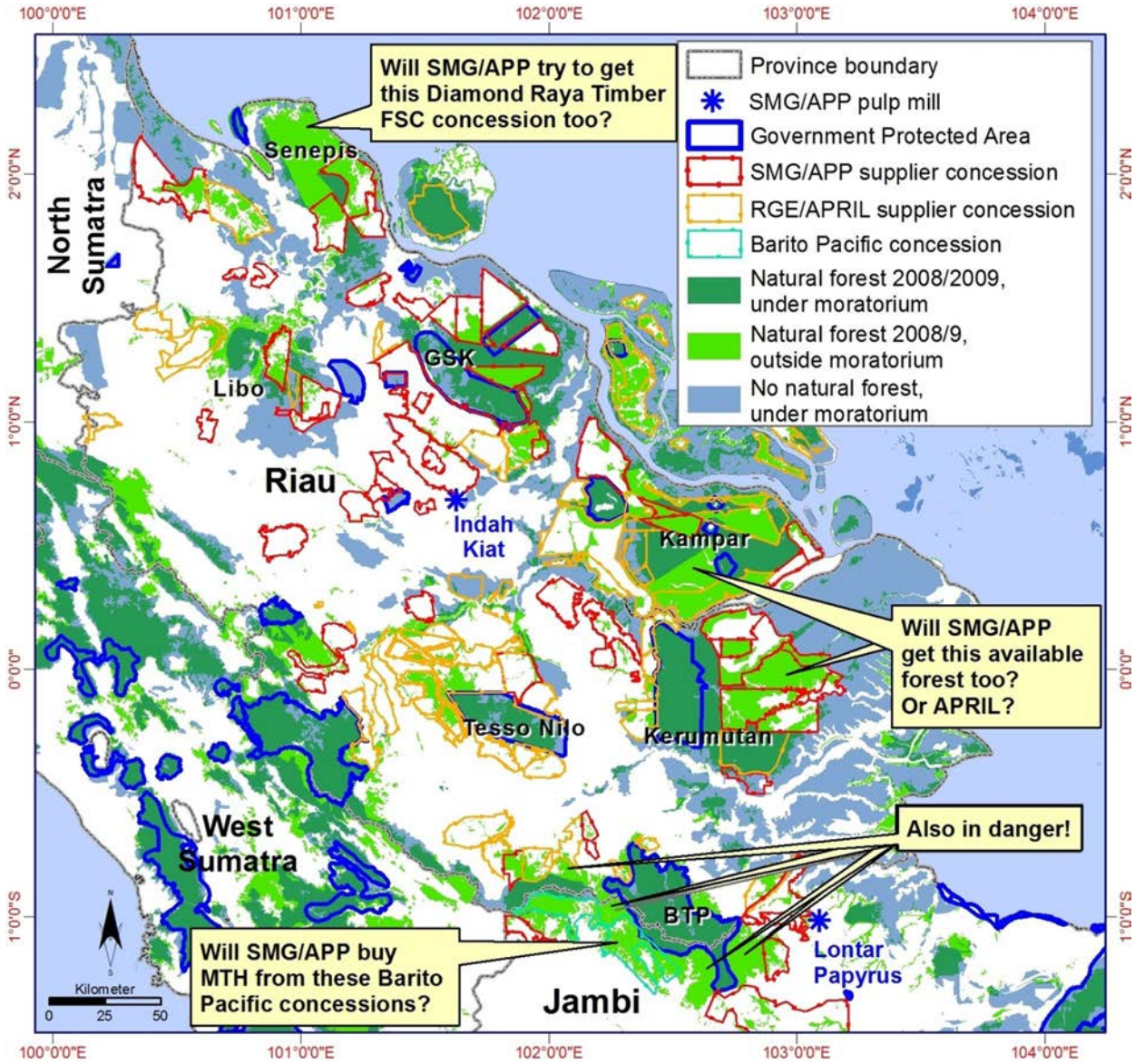

Peta 8. Konsesi-konsesi penyuplai kayu *SMG/APP dan RGE/APRIL serta Barito Pacific, hutan alam tersisa pada 2008/2009 dan kawasan moratorium (dimana izin baru tidak akan dikeluarkan selama moratorium) berdasarkan SK Menteri Kehutanan No 323/Menhut-II/2011 pada 17 Juni 2011*[190]*. Tidak ada hutan alam di dalam konsesi afiliasi SMG/APP dalam kajian wilayah yang dilindungi oleh moratorium.*

Faktanya, tidak ada dari kegiatan APP yang diiklankan (aforestasi, riset, dll.) sebagai *"bertanggungjawab menggunakan masa moratorium"* termasuk penghentian pembukaan lahan gambut, penebangan hutan alam dan membuat pulp dari kayu MTH di pabrik pengolahannya. Namun ini adalah kegiatan paling krusial yang diperlukan bagi upaya REDD yang sah agar ada maknanya sama sekali bagi Indonesia.

APP secara dramatis menyesatkan publik dengan berpikiran bahwa operasi perusahaan adalah netral karbon. Satu kontraktor, Environmental Resources Management (ERM) di Inggris membantu APP mengiklankan "footprint karbon hampir nol" berdasarkan seperangkat asumsi tak utuh yang menghapuskan pengeluaran gas rumah kaca paling krusial oleh perusahaan itu[191, 192].

ERM dan APP berniat mengabaikan emisi besar yang diakibatkan oleh penebangan hutan alam SMG/APP untuk produksi pulp-nya, dan, paling banyak, emisi luas yakni pembukaan gambut terus menerus oleh perusahaan untuk tujuan perkebunan akasia mereka setiap tahunnya. Alih-alih membuat senang pelanggan, investor dan instansi pemerintah yang mengeluarkan izin-izin, APP malah menambah sequestrasi dari perkebunan yang mengakibatkan semua emisi besar ini menambah kalkulasi footprint karbon[193] (lihat juga Bab 2.3). Menggantikan hutan tropis dengan monokultur dalam rotasi lima hingga tujuh tahun untuk prodeuksi pulp dan kertas yang segera dibuang untuk mengemisi karbon sequestered mereka, yang jauh dari definisi sah dari apa yang dinamakan proyek “aforestasi” untuk mitigasi perubahan iklim.

4. Imbauan Eyes on the Forest bagi SMG/APP

Pada April 2011, APP mengumumkan bahwa dalam kemitraannya dengan Carbon Conservation, dengan mengatakan *"Vision 2020, a roadmap to guide sustainability principles, goals and program execution across all aspects of the company's Indonesian operations from today to the year 2020."*[194] ("Visi 2020, satu peta jalan memandu prinsip kelestarian, tujuan dan pelaksanaan program di semua aspek operasi perusahaan di Indonesia dari saat ini hingga tahun 2020"), SMG/APP telah mengundang masyarakat sipil berkontribusi. Eyes on the Forest menawarkan laporan ini sebagai kontribusinya bagi upaya tersebut dengan kesimpulan sederhana saja:

Visi 2020 SMG/APP akan dilaksanakan di lansekap-lansekap bebas dari hutan dan penuh dengan kubah gambut yang amblas, jika perusahaan tidak segera mengentikan semua deforestasi, pembukaan gambut dan ekspansi kapasitas pulp tanpa perkebunan yang ada dikembangkan secara lestari.

Pengumuman rencana kelestarian lainnya bukanlah hal baru bagi SMG/APP. Pengumuman-pengumuman seperti ini datang dan menghilang, dirancang dan disebarkan dengan tujuan sederhana untuk tetap menjaga pelanggan dan investornya senang sementara memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk lebih lama lagi membuka lahan gambut dan membabat hutan-hutan.

Pada 2003, SMG/APP menjalani "penilaian dan perencanaan pasok kayu lestari" dari dua perusahaan konsultasi[195], diteken Letter of Intent dengan WWF[196], dan akhirnya memproduksi "rencana aksi kelestarian" pada 2004. Setelah meninjau ulang dokumen, WWF mengakhiri kerjasamanya dengan SMG/APP. Asumsi di luar keyakinan, satu poin dimana bahkan perusahaan konsultasi tidak bisa tahan dengan mereka dan akhirnya APP harus mempublikasikan analisis ia sendiri. Ia bersikeras untuk menebangi 180.000 hektar hutan alam lagi "untuk menjadi lestari" sementara gagal berkomitmen melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi[197]. Seperti diprediksi, perusahaan tidak pernah melaksanakan rencananya sendiri dan telah membabat lebih banyak luasan hutan daripada yang diumumkannya 180.000 saat itu. Dan perusahaan ini masih melakukan hal sama, karena batas waktu yang diberlakukannya sendiri atau operasi bebas MTH masih empat tahun ke depan lagi.

Bisakah mitra bisnis menerima pengumuman APP soal kontrak kelestarian dengan "Carbon Conservation" secara serius?

Eyes on the Forest mengimbau Asia Pulp & Paper dari Sinar Mas Group untuk menghentikan penebangan hutan alam di Sumatera, semua pulau di Indonesia dan seluruh dunia saat ini dan berkomitmen terhadap imbauan LSM seperti tercantum dalam Box 1.

Eyes on the Forest mengimbau pelanggan dan mitra bisnis lainnya untuk tidak percaya dengan klaim humas SMG/APP. Hutan dan spesies di Sumatera berada dalam keadaan yang hampir habis. Pembeli kertas dan pulp bertanggungjawab tidak seharusnya berkontribusi bagi kematian hutan-hutan dan spesies itu. Bergabunglah dengan daftar panjang perusahaan yang bertanggungjawab lainnya yang sudah berhenti membeli dari APP.

Box 2. Seruan bagi perusahaan pulp dan kertas di Indonesia, didukung oleh lebih dari 400 LSM Indonesia pada 2010 [198, 199]

1. Penghentian segera penebangan, pembabatan dan konversi hutan alam di seluruh operasi di Indonesia dan menghentikan semua pengambilan kayu keras tropis campuran hingga kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan nilai karbon tinggi bisa diidentifikasi dan dilindungi, kawasan-kawasan yang cocok untuk produksi kayu fiber disetujui oleh pemerintah, industri, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat asli dan masyarakat tergantung hutan yang terdampak.
2. Rencana berdasar waktu bagi restorasi lahan gambut dan wilayah ekologi kunci yang terdampak oleh jalan, kanal, penebangan, transportasi kayu dan perkebunan yang disetujui oleh pemerintah, industri, masyarakat sipil dan masyarakat terdampak, serta dilaksanakan.
3. Perjanjian negosiasi dengan masyarakat asli yang terdampak akibat operasi pulp yang ada, maupun masih rencana berdasarkan pada hak masyarakat asli untuk memberikan atau menahan hak persetujuan dengan prinsip bebas, mendahului dan diinformasikan [FPIC] mereka bagi pembangunan yang mungkin mempengaruhi kawasan adat mereka yang sudah ada. Penyelesaian bernegosiasi dan kompensasi adil bagi lahan untuk masyarakat bukan asli juga harus diwujudkan. Perlindungan bagi hak-hak pekerja perkebunan akasia dan pekerja pabrik pulp dan kertas, termasuk misalnya, gaji memadai, kondisi kerja sehat, pelatihan dan asuransi, juga perlu diwujudkan.
4. Komitmen bahwa kapasitas pabrik pengolahan pulp dan kertas yang diperluas maupun yang baru haruslah bebas sepenuhnya dari merkuri dan khlorin.
5. Penghentian kapasitas produksi tambahan pulp atau kertas atau ekspansi dan satu audit kapasitas produksi fiber yang sekarang guna memverifikasi kayu hutan alam tambahan (MTH) tidak dibolehkan untuk operasi sekarang dan ekspansi dan bertindak konsisten dengan persyaratan di atas.
6. Penggunaan pihak ketiga independen yang dapat diterima oleh kelompok masyarakat sipil Indonesia, guna memantau implementasi dan kepatuhan berlanjut bagi persyaratan-persyaratan di atas dan melaporkan secara reguler kepada publik soal temuan itu.

SELESAI

Untuk informasi selanjutnya, sila kontak :

Editor Eyes on the Forest
Afdhal Mahyuddin
Email: eof@eyesontheforest.or.id

Appendix 1. Wilayah diperkirakan merupakan hutan alam ditebangi untuk memasok PT IKPP dan PT LKPP.

1. Parameters used to calculate size of forest needed for production of known amounts of pulp

Parameter	Value
1. From air dry ton (adt) pulp to green metric ton (gmt) mixed tropical hardwood (MTH, obtained by clearance of natural forest) wood weight (Jaakko Poyry 1998, quoted by Barr 2001)	4.83
2. From MTH wood weight (gmt) to MTH wood volume (m^3) at pulp mill gate (APP 2004)	1.142
3. From MTH wood volume at pulp mill gate to MTH standing wood volume in natural forest (taking into account harvest, transport and chipping losses) (AMEC, quoted in APP 2004)	1.235
4. Average MTH standing wood volume harvestable per hectare of natural forest (m^3/ha) as the average volumes listed in RKT 2009 and 2010 issued to SMG/APP wood suppliers (Eyes on the Forest July 2010 and November 2010).	89

2. Estimate of deforestation caused by operation of SMG/APP's Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) mill in Riau Province, Sumatra

Comment: Forest clearance for which the IKPP mill was responsible is likely higher than calculated here. We only calculated forest clearance based on data for Riau province, yet the mill also received fiber from other provinces. None of the data taken from APP publications could be verified and may thus not be correct.

Production Year	[A] Natural forest pulped (ha)	[B] Pulp production capacity or actual production (bold)	[C] % MTH in mill fiber supply	[D] Reference and notes
1984-1987	32,329	105,000	100%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] Pirard & Cossalter (2006) [C] SMG/APP began operations in 1984 and did not have plantations ready for harvest by 1987.
1988	7,436	105,000	92%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] *"Since 1989, Indah Kiat has expanded its pulp production capacity from 120,000 tonnes to 1.7 million tonnes per annum"* (PT Indah Kiat 1999, quoted by Barr 2000). *"Between 1991 and 1999, the group's pulp processing capacity grew from 410,000 tonnes to 2.3 million tonnes per annum"* (Ausnewz 1999, quoted by Barr 2000). *"the original market pulp line has been modernized, new lines were added in 1989, 1995 and 1997"* (AMEC 2001) 1997 data was taken from U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State (1999). [C] *"Of the 100 million m^3 of wood estimated to have been consumed by the pulp industry during 1988-1999, only eight percent was harvested from plantations"* (Indonesian Pulp and Paper Association 1997 and Jaakko Poyry 1998, quoted by Barr 2000) *"The acacia wood harvested in 1999 accounted for 20 percent of the fiber consumed by Indah Kiat that year."* (Barr 2000)
1989-1990	16,996	120,000	92%	
1991-1996	174,205	410,000	92%	
1997-1998	203,239	1,435,000	92%	
1999	104,683	1,700,000	80%	
2000 - 2004	569,598	1,850,000	80%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] APP (2004) - not verified company information that may not be correct! [C] *"Asia Pulp & Paper Company Ltd. (APP), the holding company of IKPP recently reported that plantation-grown wood accounted for 20 percent of the overall mill supply in 2003 and 2004 and 35 percent in 2005."*
2005	89,052	1,866,006	62%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] APP (2008). APP (2009) - not verified company information that may not be correct! [C] For 2005-2007, we used average number of MTH content for each year found in literature. APP (2009) wrote 59% for 2005, 49% for 2006 and 8% for 2007. Cossalter (2006) wrote 65% in 2005. WWF Indonesia (June 2006) wrote 70% for 2006. The MTH figure given by APP for 2007 is low and we estimate zero percent for 2008 because APP could only use MTH on its log yard, could not transport MTH, and had to rely on plantation fibre brought in by boat from other provinces during 2007 and 2008 while APP wood suppliers were being investigated by the police for illegal logging and all MTH transport was prohibited. However, reports exist that many barges with MTH landed at the SMG/APP dock during the police investigation.
2006	87,351	1,907,282	60%	
2007	11,347	1,842,755	8%	
2008	-	2,000,000	0%	
2009	56,659	2,000,000	37%	[A] Government permits allowed SMG/APP wood suppliers to clear 56,659 hectares of natural forest in Riau (Eyes on the Forest July 2010). Forest clearance this year is likely higher as permits issued for other provinces to supply IKPP were not considered. [B] APP (2008) - not verified company information that may not be correct! [C] MTH calculated based on forest clearance and pulp production using above parameter values. MTH content is likely higher because forest clearance is likely higher.
2010	46,151	2,000,000	30%	[A] Government permits allowed SMG/APP wood suppliers to clear 41,789 hectares of natural forest in Riau (Eyes on the Forest November 2010). In addition, SMG/APP were allowed to clear 4,362 hectares based on "self approved RKT" in Riau. Forest clearance this year is likely higher as permits issued for other provinces were not considered. [B] APP (2008) - not verified company information that may not be correct! [C] MTH calculated based on forest clearance and pulp production using above parameter values. MTH content is likely higher because forest clearance is likely higher.
TOTAL	1,399,044			

3. Estimate of deforestation caused by operation of SMG/APP's Lontar Papyrus Pulp & Paper pulp mill in Jambi Province, Sumatra

Comment: None of the data taken from APP publications could be verified and may thus not be correct.

Production Year	[A] Natural forest pulped (ha)	[B] Pulp production capacity or actual production (blue) (ton/year)	[C] % MTH in mill fiber supply	[D] Reference and notes
1994-1999	307,121	665,000	100%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] This mill started its pulp production in 1994. Production figure is based on P.T. Data Consult (May 25, 2005). [C] Eyes on the Forest assumes SMG/APP did not have plantations ready for harvest by until 1999.
2000 - 2004	221,681	720,000	80%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] APP (2004) - not verified company information that may not be correct! [C] Cossalter (2006) as for IKPP in 2003 and 2004.
2005	30,674	642,753	62%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and average 62% MTH content using above parameter values [B] APP (2009) - not verified company information that may not be correct! [C] We used average of 59% by APP (2009) and 65% by Cossalter (2006).
2006	28,168	677,682	54%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values [B] [C] APP (2009) - not verified company information that may not be correct!
2007	51,886	674,081	100%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and 100% MTH content using above parameter values. [B] APP (2009) - not verified company information that may not be correct! [C] APP (2009) writes *"The percentage of plantation pulpwood used at Lontar decreased in 2007 due to the need to meet increased demand for plantation pulpwood at the Indah Kiat Perawang mill in Riau", but also* writes that Lontar Papyrus' Mixed Tropical Hardwood Pulpwood was 58% . Eyes on the Forest suspects that all plantation wood from Jambi concessions were used to supply Indah Kiat mill in Jambi during the police embargo on all MTH transport there, hence estimates 100% MTH supply for LPPP. Not verified company information that may not be correct!
2008	55,420	720,000	100%	[A] Forest clearance calculated based on pulp production and MTH content using above parameter values. [B] APP (2004) - not verified company information that may not be correct! [C] Eyes on the Forest believes that all plantation wood from Jambi concessions were used to supply Indah Kiat mill in Jambi, hence estimates 100% MTH supply for LPPP.
2009	?	720,000	?	[B] APP (2004) - not verified company information that may not be correct!
2010	?	720,000	?	[B] APP (2004) - not verified company information that may not be correct!
TOTAL PULPED	694,951			

Appendix 2. Data digunakan untuk analisis Bab 2

"Wilayah kajian" yang dianalisa dalam laporan ini termasuk provinsi Riau dan sebagian provinsi Jambi yang melingkup taman nasional Bukit Tigapuluh. Analisa kami pada Bab 2 menggunakan seperangkat data berikut ini.

1. Konsesi

Data konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan hak penguasaan hutan (HPH) yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan (2011) dan Dinas Kehutanan Riau (2006, 2011).

2. Tutupan hutan alam

Hutan alam didefinisikan sebagai vegetasi alami asli (bertentangan dengan antropogenis) yang didominasi oleh pohon-pohon dengan tutupan mahkota lebih dari 10%. Perkebunan tidaklah dianggap sebagai hutan. Hutan didefinisikan secara eksklusif sebagai "hutan alam" karena ia adalah yang menghasilan dan masih mewakili kekayaan negara dalam keanekaragamanhayati, memberikan banyak jasa lingkungan dan nilai sosial, dan menjadi tempat stok karbon. Kawasan hutan alam didelineasi oleh interpretasi visual Landsat dan data pengindraan jarak jauh optikal lainnya. Analisa rangkaian waktu dari tutupan hutan alam menggunakan data berikut ini:

- Hutan alam didelineasi oleh Setiabudi, WWF Indonesia (lihat WWF Indonesia 2008) untuk 1995
- Hutan alam didelineasi oleh Laumonier, Setiabudi, WWF Indonesia *et al.* (lihat WWF Indonesia 2010) untukj 2008/9.

3. Keanekaan flora: sektor eko-flora

Analisa tutupan alam pada sektor eko-flora pada 1995 dan 2008/9 dan kategori resiko kepunahannya didasarkan pada Laumonier (1983) [200], Laumonier *et al.* (1986) [201], Laumonier *et al.* (1987)[202], Laumonier (1990)[203], Laumonier (1997)[204], Laumonier *et al.* (2010)[205] dan WWF Indonesia (2010).

4. Keanekaan fauna: jelajah Harimau, Gajah dan Orang utan ranges

- Distribusi harimau Sumatera 1996/2005 didasarkan pada Wikramanayake *et al.* (1998, labeled Tiger Conservation Units) [206] dan Sanderson *et al.* (2006, labeled Tiger Conservation Landscapes)[207].
- Distribusi gajah Sumatera 1985 didasarkan pada Blouch & Symbolon (1985)[208].
- Distribusi orang utan Sumatera 2005-2010 dipetakan oleh Frankfurt Zoological Society[209].

5. Peat soil

Kawasan lahan gambut dan kedalaman 2002 didasarkan pada Wahyunto *et al.* (2003)[210] dan tiga sektor eko-flora terkait gambut "Hutan Rawa Gambut", "Rawa Gambut Campuran" dan "Rawa Gambut" (lihat di di bawah data set 2).

6. Kepadatan kanopi hutan alam

Tiga kelas kepadatan kanopi hutan yang dibedakan oleh interpretasi visual dari citra satelit Landsat di WWF Indonesia (2008).

7. Data dasar

- Data batas provinsi Sumatra oleh Bakosurtanal (2008).

- Peta Moratorium Presiden berdasarkan SK Menhut Nomor 323/Menhut-II/2011 tanggal 17 June 2011 (teksnya lihat http://appgis.dephut.go.id/appgis/moratorium/SK_323_MENHUT.pdf; untuk peta Kementerian Kehutanan, lihat http://appgis.dephut.go.id/appgis/petamoratorium.html). The shape file dipublikasikan oleh (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan & Pengendalian Pembangunan) di: http://dev.ukp.go.id/web/informasi-publik/cat_view/20-geospasial (diunduh pada 29 September 2011).

Referensi

[1] Pirard, R. & Cossalter, C. (2006) The Revival of Industrial Forest Plantations in Indonesia's Kalimantan Provinces. Will they help eliminated fiber shortfalls at Sumatran pulp mills or feed the China market? CIFOR Working Paper No. 37.

[2] Brown, D. W. (1999) Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia; Implications for Forest Sustainability and Government Policy." DFID/Indonesia-UK Tropical Forest Management Program Report No. PFM/EC/99/06.

[3] Barr, C. (2000) Profits on Paper: The Political Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and Paper Industries. CIFOR.
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/FLEG/20171586/Chriss_Bar.pdf

[4] Potter, L. & Badcok, S. (2001) Case Study 6: The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops: case study of Riau province, the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. CIFOR Reports on Decentralisation and Forests in Indonesia.
http://www.cifor.cgiar.org/Publications/DocumentDownloader?a=d&p=¥publications¥pdf_files¥Books¥Cases%206-7.pdf

[5] Friends of the Earth (May 2001) Report: Paper Tiger, Hidden Dragons: The responsibility of international financial institutions for Indonesian forest destruction, social conflict and the financial crisis of Asia Pulp & Paper. http://www.foe.co.uk/resource/reports/paper_tiger_hidden_dragons.pdf

[6] Barr, C. (2001) Banking on sustainability: structural adjustment and forestry reform in post-Suharto Indonesia. WWF Macroeconomics for Sustainable Development Program Office & CIFOR.
http://www.cifor.cgiar.org/Publications/DocumentDownloader?a=d&p=¥publications¥pdf_files¥Books¥cbarr¥Banking.pdf

[7] WWF Germany (2003) Elephant Forests on Sale. Rain forest loss in the Sumatran Tesso Nilo region and the role of European banks and markets.

[8] Forest Stewardship Council. FSC Principles and Criteria. http://www.fsc.org/1093.html

[9] APP China website. http://www.app.com.cn/english/aboutus_development.html

[10] WWF Indonesia (2010) Sumatra's Forests, their Wildlife and the Climate - Windows in Time: 1985, 1990, 2000, and 2009. A quantitative assessment of some of Sumatra's natural resources submitted as technical report by invitation to the National Forestry Council (DKN) and the National Development Planning Agency (BAPPENAS) of Indonesia. Full report for download:
http://assets.wwfid.panda.org/downloads/wwf_indonesia__2010__sumatran_forests_wildlife_climate_report_for_dkn___bappenas.pdf Online summary:
http://www.savesumatra.org/index.php/wherewework/detail/Sumatra

[11] WWF Indonesia (October 2006) Monitoring Brief October 2006: Asia Pulp & Paper (APP). Hiding Destruction behind False Advertisements: *APP continues to ignore calls for conservation beyond "legal compliance", and even fails on the latter.*
http://www.wwf.or.jp/activity/forest/lib/APP_Oct06_MonitoringRpt.pdf

[12] PRWeek (30 September 2010) Asian Pulp & Paper Drafts In Cohn & Wolfe To Fight Greenpeace Accusations.
http://www.prweek.com/news/1031982/Asian-Pulp---Paper-drafts-Cohn---Wolfe-fight-Greenpeace-accusations/

[13] Environmental Resource Management (2008) Asia Pulp & Paper- Indonesia: Executive Summary of APP's Carbon Footprint Assessment. www.cathaybr.com/pdf/APP_CarbonFootPrint.pdf

[14] Laurance, W. *et al.* (25 October 2010) An Open Letter about Scientific Credibility and the Conservation of Tropical Forests.

http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Leading%20scientists%20%2825Oct10%29%20Open%20letter%20to%20ITS-WGI-Oxley.pdf

[15] Mongabay.com (1 November 2010) Nobel Prize winner, anti-poverty group, scientists fire back at logging lobbyist. http://news.mongabay.com/2010/1101-oxley_maathai.html

[16] The New York Times (30 March 2011) Odd Alliance: Business Lobby and Tea Party. http://www.nytimes.com/2011/03/31/us/politics/31liberty.html

[17] Asia Pulp & Paper (11 August 2010) Letter to Stakeholders. Getting the Facts Down on Paper. http://www.asiapulppaper.com/portal/app_portal.nsf/Web-MenuPage/25789CB95E09B9F54725777C0023C42A/$FILE/Mazars.pdf

[18] Asia Pulp & Paper (5 April 2011) Asia Pulp & Paper Group Partners with Carbon Conservation on Vision 2020: A Roadmap to Global Leadership in Sustainable Pulp and Paper Production. http://www.csrwire.com/press_releases/31948-Asia-Pulp-Paper-Group-Partners-with-Carbon-Conservation-on-Vision-2020-A-Roadmap-to-Global-Leadership-in-Sustainable-Pulp-and-Paper-Production

[19] The Guardian George Monbiot's Blog (2 December 2010) Why is a former Greenpeace activist siding with Indonesia's logging industry? http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2010/dec/02/sumatra-rainforest-destruction-patrick-moore

[20] Greenbury, A. (3 August 2011) Help Us Save the Sumatran Tiger. http://www.rainforestrealities.com/2011/08/03/help-us-save-the-sumatran-tiger/

[21] Indonesian Pulp & Paper Association (9 June 2011) APKI Speaks Out Against Greenpeace Attacks. http://www.rainforestrealities.com/2011/06/09/apki-speaks-out-against-greenpeace-attacks/

[22] Ally Media (2011) Asia Pulp & Paper – Reforestation. http://www.youtube.com/watch?v=qbXLhkWehgE

[23] http://www.trademarkia.com/app-cares-wwwasiapulppapercom-77947823.html

[24] Asia Pulp & Paper (11 August 2010)

[25] http://www.rainforestrealities.com/2011/05/09/open-letter-to-wwf/

[26] Ally Media (2011)

[27] Asia Pulp & Paper (22 February 2011) Asia Pulp & Paper Lays Out Key Milestones On Path to 100 Percent Pulpwood Supply Certification. http://www.businesswire.com/news/home/20110222007673/en/Asia-Pulp-Paper-Lays-Key-Milestones-Path

[27] Greenbury (3 August 2011)

[28] Asia Pulp & Paper (5 April 2011)

[29] See many reports available at http://www.eyesontheforest.or.id and http://www.savesumatra.org/index.php/link

[30] AMEC (2001) APP Pulp Mills & Sinar Mas Group Forestry Companies. Environmental Compliance & Wood Supply Audit Main Report. Asia Pulp & Paper (2004) APP Sustainability Action Plan. Asia Pulp & Paper (2008) Our Mills. http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/Web-MenuPage/B65C5196BF3DD73A4725761C002F65A4/$FILE/Our%20Mills.pdf Asia Pulp & Paper (2009) 2007 Growing a Sustainable Future. Environmental and Social Sustainability Report for Indonesia. See other sources in the table.

[31] U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State (1999). Indonesia – Pulp and Paper – ISA981101 USDOC, International Trade Administration. http://ita.doc.gov/td/forestprod/indonesia.htm Barr (2000). P.T. Data Consult (May 25, 2005) Indonesia feared to become net importer of pulp. (INDUSTRY), published in Indonesian Commercial Newsletter. http://www.thefreelibrary.com/1.+Indonesia+feared+to+become+net+importer+of+pulp.-a0141997821 Pirard & Cossalter (2006). Cossalter, C. (2006) APP and APRIL's commitments for Sustainable pulpwood plantations. Where do we stand? Draft. http://environment.yale.edu/tfd/uploads/APP__APRIL_25_November_2006.pdf

[32] Barr (2000)

[33] Asia Pulp & Paper (2004)

[34] Asia Pulp & Paper (May 2007) APP 2005/06 Environment Report. http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/Web-MenuPage/1B2BBDDE7FB9B64C4725739B00232E6A/$FILE/SR1.PDF

[35] Asia Pulp & Paper (22 February 2011)

[36] Riley, J. (19 Aprli 2008) Peat, Pulp & Paper: Climate Impact of Pulp Tree Plantations on Peatland in Indonesia. http://www.environmentalpaper.org/documents/Jack%20Rieley.pdf Rieley & Page (2008)
[37] Barr, C. (10 April 2008) Indonesia' s Pulp & Paper Industry: Overview of Risks and Opportunities. http://www.environmentalpaper.org/documents/Chris%20Barr%20-%20CIFOR.pdf
[38] Obidzinski, K & Dermawan, A. (30 May 2011) CIFOR Forest blog: New round of pulp and paper expansion in Indonesia: What do we know and what do we need to know? http://blog.cifor.org/2905/new-round-of-pulp-and-paper-expansion-in-indonesia-what-do-we-know-and-what-do-we-need-to-know/
[39] Rieley, J.O. & S.E. Page (2008) Carbon Budgets under Different Land Uses on Tropical Peatland. Included in: Rieley, J.O., Banks, C.J. and Page, S.E. (2008) Future of Tropical Peatlands in Southeat Asia as Carbon Pools and Sinks. Papers Presented at the Special Session on Tropical Peatlands at the 13th International Peat Congress, Tullamore, Ireland, 10th June 2008, CARBOPEAT Partnership, International Peat Society and University of Leicester, United Kingdom. http://www.geog.le.ac.uk/carbopeat/media/pdf/tullamorepapers/ipc_tropical_peat_special_session.pdf
[40] Barr (10 April 2008)
[41] WWF Indonesia (2010)
[42] Bisnis Indonesia (24 April 2011) Konglomerat Kembangkan Investasi HTI Di Kalimantan Dan Papua. http://www.bisnis.com/articles/konglomerat-kembangkan-investasi-hti-di-kalimantan-dan-papua
[43] Obidzinski & Dermawan (30 May 2011)
[44] KKI Warsi, Frankfurt Zoological Society, Eyes on the Forest and WWF-Indonesia (14 December 2010a) Press Release: Once-Untouched Haven for Tigers, Orangutans, Elephants Being Systematically Targeted by APP/SMG. Sumatran Forest is Last Home of the Indigenous Orang Rimba and Talang Mamak. http://www.wwf.or.id/en/news_facts/press_release/?21160/Once-Untouched-Haven-for-Tigers-Orangutans-Elephants-Being-Systematically-Targeted-by-APPSMG KKI Warsi, Frankfurt Zoological Society, Eyes on the Forest and WWF-Indonesia (14 December 2010b) Report: Last Chance to Save Bukit Tigapuluh. Sumatran tigers, elephants, orangutans and indigenous tribes face local extinction, along with forest. http://www.wwf.or.id/btp_report_dec10_pdf
[45] Laumonier, Y., Uryu, Y., Stwe, M., Budiman, A., Setiabudi, B. & O. Hadian. (2010) Eco-floristic sectors and deforestation threats in Sumatra: indentifying new conservation area network priorities for ecosystem-based land use planning. Biodiversity Conservation (2010) 19: 1153-1174. http://www.springerlink.com/content/c77376k574051178/fulltext.pdf See also WWF Indonesia (2010).
[46] IUCN, The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources lists Sumatran tiger (*Panthera tigris ssp. sumatrae*), Sumatran elephant (*Elephas maximus ssp. sumatranus*) and Sumatran orangutan (*Pongo abelii*) as critically endangered. Linkie, M., Wibisono, H.T., Martyr, D.J. & Sunarto, S. 2008. *Panthera tigris ssp. sumatrae.* In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. <http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15966/0, downloaded on 14 November 2011> Gopala, A., Hadian, O., Sunarto, ., Sitompul, A., Williams, A., Leimgruber, P., Chambliss, S.E. & Gunaryadi, D. 2011. *Elephas maximus ssp. sumatranus.* In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. <http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/199856/0, downloaded on 14 November 2011> Singleton, I., Wich, S.A. & Griffiths, M. 2008. *Pongo abelii.* In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. <http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/39780/0, downloaded on 14 November 2011>
[47] Greenbury, A. (31 January 2011) Asia Pulp and Paper: why activists are wrong over destructive logging allegations. Published at The Ecologist.
[48] Laumonier et al. (2010). WWF Indonesia (2010)
[49] Laumonier *et al*. (2010). WWF Indonesia (2010).
[50] Gillison, A.N. (2001) Vegetation Survey and Habitat Assessment of the Tesso Nilo Forest Complex. Pekanbaru, Riau Province, Sumatra, Indonesia (27 October – 10 November 2001). WWF Technical Report, WWF, Washington, DC, USA.
[51] Prawiradilaga, D. M. et al. (2003) Survey Report on Biodiversity of Tesso Nilo. May – August 2003. Indonesian Research Centre for Biology-LIPI & WWF Indonesia.
[52] WWF Indonesia (16 June 2004) Monitoring of Illegal Logging Operations in Riau, Sumatra. Deliveries of Illegally Cut Wood from Proposed Tesso Nilo National Park to APP's Indah Kiat Pulp and Paper Mill in August 2003 and April 2004. http://www.wwf.or.id/attachments/Monitoring_of_Illegal_Logging.pdf
[53] Greenpeace (25 July 2011) Endangered Sumatran tiger dies in trap on APP concession in Indonesia. http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/endangered-sumatran-tiger-dies-in-trap-on-app/blog/35859/

[54] For example, see Eyes on the Forest (4 April 2006) Interactive Map on Elephant Distribution and Conflict in Riau, Sumatra. WWF Indonesia (2006) Riau's Elephants: The 2006 Tragedy. http://www.wwf.or.id/en/about_wwf/whatwedo/forest_species/where_we_work/tessonilobukittigapuluh/focal_species/elephants/elephant_tragedy/ Eyes on the Forest (18 April 2006) Forests to Paper, Forests to Palm Oil and No Place to Live for Riau's Elephants. http://www.wwf.or.jp/activities/upfiles/EoFElephant18Apr06_.pdf

[55] For example, see: Eyes on the Forest (30 November 2010) EoF calls on SMG/APP and APRIL to keep their promises: Stop conversion of natural forest and drainage of peat to produce pulp, stop violation of the country's climate commitments. http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2830Nov10%29%20Riau%20RKT%202010%20natural%20forest%20and%20peat%20conversion%20EN%20FINAL.pdf Eyes on the Forest (8 July 2010) Investigative Report: Business as Usual in Riau, Sumatra: Pulp Industry Continues Clearance of Natural Forest. http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Report_July2010_pulp_industry_continues_clearance%20B.pdf Eyes on the Forest (April 2010) Investigative Report December 2009. Two Asia Pulp & Paper / Sinar Mas Group associated companies continue clearcutting of deep peatland forest of Kerumutan in Riau Province, Sumatra, threatening peatland forest ecosystems, Sumatra tiger and global climate. http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF_Investigative_Report_April2010_APP_Kerumutan.pdf Eyes on the Forest (27 July 2009) Fires in APP/Sinar Mas Concessions Add to Region's Haze Woes, Threaten New UN Biosphere Reserve. http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF_PR_Fire_hotspot_final_27_July_2009.pdf Eyes on the Forest (26 March 2008) Eyes on the Forest to Asia Pulp & Paper: Cease all destruction of one of the world's largest tropical peatland forests – Kampar peninsula in Riau, Sumatra, Indonesia. http://eyesontheforest.or.id/attach/Investigative%20Report%20english%20version%20march%202008.pdf

[56] Laumonier *et al*. (2010). WWF Indonesia (2010).

[57] Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O'Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf, and E. Wikramanayake. 2006. Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF.

[58] The Jakarta Globe (24 November 2010) Indonesia Joins World Forum Vowing to Save Tigers. http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/indonesia-joins-world-forum-vowing-to-save-tigers/408341

[59] WWF Indonesia (10 May 2011) WWF captures Sumatran Tiger Triplets in forest under imminent threat of clearing. http://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=22341&uLangID=1

[60] KKI Warsi, Frankfurt Zoological Society, Zoological Society of London, PKHS & WWF Indonesia (8 January 2008a) Joint Press Release: APP Forest Clearing Threatens Lives of Local Communities and Endangered Species. http://www.wwf.or.id/en/news_facts/press_release/?2642/Forest-Clearing-In-Bukit-Tigapuluh-Threatens-Lives-Of-Local-Communities-And-Endangered-Species KKI Warsi, Frankfurt Zoological Society, Zoological Society of London, PKHS & WWF Indonesia (8 January 2008b) Joint Report: Asia Pulp and Paper (APP) Threatens Bukit Tigapuluh Landscape. http://rafflesia.wwf.or.id/library/attachment/pdf/BTp_Investigation_Jan%202008_draft_FINAL.pdf

[61] KKI Warsi *et al*. (14 December 2010a). KKI Warsi *et al*. (14 December 2010b)

[62] WWF and Google Earth (9 May 2011) Video: Saving Bukit Tigapuluh. http://www.youtube.com/watch?v=qsg6N9p0Vy0

[63] WWF Indonesia (10 May 2011) WWF captures Sumatran Tiger Triplets in forest under imminent threat of clearing. http://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=22341&uLangID=1

[64] Rainforest Action Network and Japan Tropical Forest Action Network (October 2010) Asia Pulp & Paper's Hidden Emissions: Calculating the Real Carbon Footprint of APP's Paper. http://ran.org/sites/default/files/app_hidden_emissions.pdf

[65] Environmental Resource Management (2008)

[66] Worrell *et al*. 2001, quoted by Environmental Resource Management (2008)

[67] Rainforest Action Network and Japan Tropical Forest Action Network (October 2010)

[68] WWF Indonesia (2008).

[69] WWF Indonesia (2008). WWF Indonesia (2010). Eyes on the Forest (16 March 2011) Press Release: EoF coalition urges APP and APRIL not to clear 800,000 hectares of natural forests in their concessions. http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=326 Eyes on the Forest (15 March 2011) Impacts of the LoI moratorium on Sumatra's natural forest and peat - an analysis of Riau, Sumatra's deforestation hotspot. Submitted to Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2815Mar11%29%20Impacts%20of%20LoI%20moratorium%20on%20Sumatra%20and%20Riau%20EN%20Submitted.pdf

[70] The Ministry of Forestry, Republic of Indonesia (2007) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia. REDD Methodology and Strategies Summary for Policy Makers.
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/LITBANG/IFCA/Summary%204%20policy%20makers_final.pdf

[71] WWF Indonesia (2008)

[72] WWF Indonesia (2010)

[73] WWF Indonesia (2008)

[74] Eyes on the Forest (16 March 2011). Eyes on the Forest (15 March 2011)

[75] Riau's reference emission level was around 425 megatons according to the National REDD+ Strategy Draft 1 Revised, available at
http://www.un.or.id/sites/default/files/COMPLETEStranas1RevisedEng%20final%20version.pdf

[76] If we assume 86 ton CO2/ha/year of peat emissions from pulpwood plantation on peat, based on Hooijer et al. (2010) http://www.biogeosciences.net/7/1505/2010/bg-7-1505-2010.pdf, annual CO2 emissions from these areas could be 61 megatons/year.

[77] Eyes on the Forest (15 March 2011).

[78] WWF Indonesia (2008)

[79] Wahyunto *et al.* (2003)

[80] Asia Pulp & Paper (31 March 2011) Advertisement on a Dutch newspaper, De Groene Amsterdammer. The same advertisement was used in the US and various countries in Europe this year.

[81] Asia Pulp & Paper (31 August 2011) Advertisement in a Hong Kong newspaper, the South China Morning Post.

[82] Asia Pulp & Paper (31 March 2011)

[83] WWF (20 February 2004) Time is running out for APP. http://assets.wwfid.panda.org/downloads/time_is_running_out_4_app.pdf WWF US (20 February 2004) WWF Calls on U.S. Retailers to Demand Paper Giant APP Stop Unsustainable Logging.
http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2004/WWFPresitem691.html

[84] Forest Stewardship Council (December 2007) Forest Stewardship Council dissociates with Asia Pulp and Paper.
http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/Stakeholder_updates/FSC_dissociates_with_APP-EN.pdf

[85] Rainforest Alliance Public Statement (January 2007) Statement: Termination of Contract to Verify High Conservation Value Forests (HCVF) for APP in Sumatra, Indonesia.
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/app.pdf

[86] Office Depot (2011) Office Depot's industry-leading Global Environmental Strategy.
http://www.officedepot.cc/environment/downloads/2011-environmental-overview.PDF

[87] The Wall Street Journal (7 February 2008) Green-Minded Staples Ends Ties With Asia Pulp & Paper.

[88] The Jakarta Globe (6 July 2010) Carrefour and Kraft Add To Sinar Mas Group's Woes.
http://www.thejakartaglobe.com/business/carrefour-and-kraft-add-to-sinar-mas-groups-woes/384511

[89] Forest Ethics (2009) Green Grades 2009. A Report Card on the Paper Practices of the Office Supply Sector. Summary of United Stationers.
http://www.forestethics.ca/downloads/Green-Grades-UnitedStationers-Summary-09.pdf

[90] Forest Ethics (2009) Green Grades 2009. A Report Card on the Paper Practices of the Office Supply Sector. Summary of Target. http://www.forestethics.org/downloads/Green-Grades-Target-Summary-09.pdf

[91] Southern California Public Radio (5 October 11) Mattel breaks up with Asia Pulp and Paper after Greenpeace's Barbie-based campaign [UPDATE].
http://www.scpr.org/news/2011/10/05/29262/mattel-breaks-asia-pulp-and-paper-after-greenpeace/
Greenpeace (5 October 2011) Success: Barbie and Mattel drop deforestation!
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/success-barbie-and-mattel-drop-deforestation/blog/37176/

[92] Greenpeace (2 November 2011) Toy giant Hasbro latest to introduce tough paper policy following Greenpeace investigation.
http://www.greenpeace.org/usa/en/media-center/news-releases/Hasbro-latest-company-to-drop-rainforest-packaging1/

[93] Greenpeace (21 May 2007) El mercado español cierra las puertas al papel procedente de la destrucción de los bosques de Indonesia. http://www.greenpeace.org/espana/es/news/el-mercado-espa-ol-cierra-las/

[94] RobinWood (25 August 2004) ROBIN WOOD überzeugt Metro: Handelskonzern will auf Papier aus Regenwaldzerstörung verzichten. http://www.robinwood.de/german/presse/040825.htm
[95] RobinWood (31 May 2011) Papiergiant APP verliert weiteren Kunden in Europa. KiK verzichtet auf Schreibpapier aus Indonesian. http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M52f2807ec82.0.html
[96] Greenpeace (30 January 2011) Asia Pulp and Paper Awarded Golden Chainsaw. Greenpeace accuses company of being one of worst rainforest destroyers in Indonesia.
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Asia-Pulp-and-Paper-Awarded-Golden-Chainsaw/
[97] Greenpeace (2 November 2011)
[98] Greenpeace (2 November 2011)
[99] PrintWeek (8 August 2008) APP defiant despite losing Woolworths contract over environmental allegations.
http://www.printweek.com/news/838307/APP-defiant-despite-losing-Woolworths-contract-environmental-allegations
[100] The Sydney Morning Herald (25 August 2011) IGA dumps toilet paper product.
http://news.smh.com.au/breaking-news-national/iga-dumps-toilet-paper-product-20110825-1jats.html
[101] Metcash Limited (23 August 2011) IGA Paper Products Sources from Indonesia.
http://www.metcash.com/our-responsibility/in-the-news
[102] Greenpeace (2 November 2011)
[103] PrintWeek (1 March 2002) APP shunned until it becomes green.
http://www.printweek.com/news/426984/APP-shunned-until-becomes-green/
[104] The Guardian George Monbiot's Blog (2 December 2010)
[105] Greenpeace (30 January 2011)
[106] Greenpeace (30 January 2011)
[107] Greenpeace (June 2011) Sinar Mas under Investigation. How APP is Toying with Extinction.
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/photos/forests/2011/app/sections/ToyingWithExtinction_Full.pdf
[108] Greenpeace (June 2011)
[109] WWF Indonesia (20 October 2006) APP Hides Destruction Behind False Advertisements.
http://www.wwf.or.id/en/news_facts/press_release/?7460/APP-Hides-Destruction-Behind-False-Advertisements
[110] Greenpeace (22 February 2005) Victory for public environmental action as APP withdraws lawsuit.
http://www.greenpeace.org/eastasia/press/releases/forests/2005/victory-for-public-environment/
[111] Mongabay.com (3 November 2009) Gucci drops APP in pledge to save rainforests.
http://news.mongabay.com/2009/1103-hance-gucci.html
[112] Greenpeace (2 November 2011)
[113] Ourfutureplanet (16 August 2011) Lego banishes Asia Pulp & Paper due to deforestation link.
http://www.ourfutureplanet.org/news/607-lego-banishes-asia-pulp-a-paper-due-to-deforestation-link
[114] GraphiLine.com (21 December 2010) Carrefour et Leclerc déréférencent le papetier Asia Pulp and Paper (APP).
http://www.graphiline.com/article/13816/Carrefour-et-Leclerc-dereferencent-le-papetier-Asia-Pulp-and-Paper-(APP)
[115] The Jakarta Globe (6 July 2010)
[116] Greenpeace (7 November 2011) Indonesian Rain forest Destroyer Asia Pulp and Paper Loses More Contracts.
http://www.greenpeace.nl/press/Persberichten-2011/Reclame-Code-Commissie-reclames-APP-misleidend/
[117] Asia Pulp & Paper (31 March 2011)
[118] Greenbury (3 August 2011)
[119] Greenomics (18 May 2011)
[120] Asia Pulp & Paper (26 October 2011) Sumatran Tiger Conservation Foundation Rescues Another Endangered Tiger, Begins Relocation Process.
http://www.businesswire.com/news/home/20111026007036/en/Sumatran-Tiger-Conservation-Foundation-Rescues-Endangered-Tiger
[121] Greenbury (3 August 2011)
[122] Eyes on the Forest (28 October 2011) APP's tiger capture questioned.
http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=499

[123] For example, see Eyes on the Forest (May 2011) Investigative Report. PT Suntara Gaja Pati and PT Ruas Utama Jaya, two affiliated companies to APP/SMG, continue clearcutting of Senepis Sumatran tiger forest, where the group contributes only less than 15 percent area for Senepis Buluhala Sumatran tiger conservation.
http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Investigative%20Report%20PT%20SGP%20PT%20RUJ%20Senepis_May%202011.pdf

[124] Riau Forestry Agency Letter No. 522.1/PR/7518 on 23 August 2004. Riau Governor Letter No. 500/EKBANG/63.18 on 18 October 2004.

[125] For example, see WWF Indonesia (October 2006)

[126] PT Suntara Gajapati Letter Number: 022/SG/VI/2006, dated 22 June 2006.

[127] Greenomics (18 May 2011)

[128] Eyes on the Forest (17 March 2009) Press release: Forest clearing by Giant APP/Sinar Mas linked to 12 years of Sumatran tiger, human fatalities.
http://eyesontheforest.or.id/attach/EoFRiauTigerConflictPR_17Mar09.pdf Map
http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20MAP%20for%20%20PR%20on%20APP%20and%20tiger%20conflicts_17Mar09.pdf

[129] KKI Warsi *et al*. (8 January 2008a). KKI Warsi *et al*. (8 January 2008b).

[130] KKI Warsi *et al*. (14 December 2010a). KKI Warsi *et al*. (14 December 2010b).

[131] WWF Indonesia (9 May 2011) WWF captures Sumatran tiger triplets in forest under imminent threat of clearing.
http://www.wwf.or.id/en/?22341/Video-otomatis-WWF-merekam-induk-dan-anak-harimau-di-habitat-yang-terancam

[132] WWF and Google Earth (9 May 2011) Video: Saving Bukit Tigapuluh.
http://www.youtube.com/watch?v=qsg6N9p0Vy0

[133] KKI Warsi *et al*. (14 December 2010a). KKI Warsi *et al*. (14 December 2010b).

[134] Asia Pulp & Paper (27 July 2009) APP supports creation of new Taman Raja Nature Reserve in Indonesia.

[135] KKI Warsi *et al*. (14 December 2010b)

[136] Greenomics (November 2011) Reasons behind Asia Pulp and Paper's Taman Raja & Kampar Carbon Reserves. http://www.greenomics.org/docs/Report_201111_Reasons_Behind_APP's_Reserves.pdf

[137] Asia Pulp & Paper CNN International Advertorials (December 2009) "Conservation".
http://www.youtube.com/watch?v=rEyduROW8Sk

[138] Eyes on the Forest (30 November 2010). WWF Indonesia (October 2006)

[139] Eyes on the Forest (30 November 2010). Also see other Eyes on the Forest reports at
http://www.eyesontheforest.or.id

[140] Eyes on the Forest (10 November 2010) EoF News: More Riau official sentenced for forestry graft case. http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=304

[141] Greenomics (18 May 2011)

[142] Business Wire (3 December 2010) Carbon Conservation and APP introduce the World's First Pulpwood Plantation to Carbon Reserve REDD-Plus Initiative.
http://www.businesswire.com/news/home/20101003005120/en/Carbon-Conservation-APPIntroduce-World%E2%80%99s-Pulpwood-Plantation

[143] Eyes on the Forest (30 November 2010). Greenomics (23 November 2010) Pulling the wool over the public's eyes: Asia Pulp & Paper deceives public over "Kampar Carbon Reserve" project.
http://www.greenomics.org/docs/Report_201011_APPdeceivespublicovercarbonproject.pdf Greenomics (November 2011)

[144] http://www.asiapulppaper.com "Tackling Climate Change" under Sustainability & CSR section, viewed on 3 August 2010.

[145] Asia Pulp & Paper (31 August 2011)

[146] http://www.asiapulppaper.com "Tackling Climate Change" under Sustainability & CSR section, viewed on 3 August 2010.

[147] Asia Pulp & Paper (31 August 2011)

[148] WWF Indonesia (October 2006)

[149] WWF Indonesia (2008) Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. WWF Indonesia Technical Report, Jakarta, Indonesia.
http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2008/WWFPresitem7596.html

[150] Eyes on the Forest (April 2010)

[151] Eyes on the Forest (8 July 2010)

[152] Eyes on the Forest (30 November 2010)

[153] KKI Warsi *et al.* (14 December 2010a). KKI Warsi *et al*. (14 December 2010b).

[154] Also see many Eyes on the Forest and other reports collected at http://www.eyesontheforest.or.id and http://www.savesumatra.org/index.php/link

[155] Eyes on the Forest (30 November 2010)

[156] Mongabay.com (18 November 2010) Scientists call upon Indonesia to recognize value of secondary forests. http://news.mongabay.com/2010/1118-letter_norway_indonesia.html

[157] For example, read Eyes on the Forest (8 July 2010) and Eyes on the Forest (30 November 2010).

[158] Greenomics (18 May 2011) Pulp and Paper Giants Show Abject Lack of Concern for Sumatran Tiger, Despite Aggressive PR Claims. http://www.greenomics.org/docs/Report_201105_Sumatran_Tiger.pdf

[159] Asia Pulp & Paper (31 August 2011)

[160] Asia Pulp & Paper (22 February 2011)

[161] Asia Pulp & Paper (22 February 2011)

[162] For example, read Eyes on the Forest (April 2010), Eyes on the Forest (8 July 2010), Eyes on the Forest (30 November 2010).

[163] Act of the Republic of Indonesia No. 5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and Their Ecosystems. http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins3867.pdf

[164] Law (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA) Nomor 26 Tahun 2007

http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf

[165] Government Regulation (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA) Nomor 26 Tahun 2008

http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_26_Tahun_2008.pdf

[166] Greenomics (18 May 2011)

[167] The Jakarta Post (17 September 2008) Pelalawan regent gets 11 years. http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/17/pelalawan-regent-gets-11-years.html The Jakarta Post (14 February 2011) Supreme Court rejects former regent's appeal in illegal logging case. http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/14/supreme-court-rejects-former-regent039s-appeal-illegal-logging-case.html Eyes on the Forest (10 November 2010) More Riau official sentenced for forestry graft case. http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=304 The Jakarta Globe (19 May 2011a) A Timeline of the Riau Investigation. http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/a-timeline-of-the-riau-investigation/441823

[168] Eyes on the Forest (26 March 2011) Siak District Head detained over forestry corruption charge. http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=328 The Jakarta Post (13 August 2011) Former Siak regent tried for graft. http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/13/former-siak-regent-tried-graft.html Eyes on the Forest (16 August 2011) Siak District Head prosecuted in Riau. http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=488

[169] detikNews (12 August 2011) Jadi Tersangka Korupsi Sejak 2008, Bupati kampar Diperiksa KPK. http://us.detiknews.com/read/2011/08/12/105450/1702190/10/jadi-tersangka-korupsi-sejak-2008-bupati-kampar-diperiksa-kpk Riau Pos (12 August 2011) Bupati Kampar diperiksa KPK. http://www.riaupos.co.id/berita.php?act=full&id=1529&kat=5 PekanbaruExpress.com (14 September 2011) KPK periksa dan geledah rumah Bupati Kampar Burhanudin http://www.pekanbaruexpress.com/korupsi/korupsi/4385-kpk-periksa-dan-geledah-rumah-burhanudin Nasional inilah.com (15 September 2011) KPK geledah rumah Burhanuddin. http://nasional.inilah.com/read/detail/1774454/kpk-geledah-rumah-burhanuddin

[170] The Jakarta Globe (19 May 2011b) How a $115b Illegal Logging Probe Was Felled. Unanswered Question: Why the sudden end to an apparently watertight two-year police investigation into 14 pulp and paper companies' forest clerarance in Riau? http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/special-report-how-a-115b-illegal-logging-probe-was-felled/441679

[171] The Jakarta Globe (19 May 2011a)

[172] The Jakarta Globe (19 May 2011c) KPK Vows to Pursue Logging 'Cold Cases' http://www.thejakartaglobe.com/news/kpk-vows-to-pursue-logging-cold-cases/441684

[173] The Jakarta Post (14 June 2011) Police resume probes into 14 timber firms. http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/13/police-resume-probes-14-timber-firms.html

[174] See also articles by Eyes on the Forest, for example, Eyes on the Forest (27 July 2005) WWF, Walhi,

Jikalahari: “Logging Moratorium for Companies with Questionable Industrial Timber Plantation Licenses”. http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=12 Eyes on the Forest (April 2010). Eyes on the Forest (8 July 2010). Eyes on the Forest (30 November 2010).

[175] Eyes on the Forest (8 July 2010).

[176] Asia Pulp & Paper (22 February 2011)

[177] Asia Pulp & Paper (10 March 2011) Asia Pulp & Paper Joins Indonesian Associations Pledging 100 Percent Industry Adherence to National Wood Legality Laws. Indonesian Industry Associations Calls on Governments Worldwide to Recognize SVLK Certification Standards in National Procurement Policies. http://eon.businesswire.com/news/eon/20110310005512/en/Asia-Pulp-%26-Paper/APP/Indonesia

[178] Asia Pulp & Paper (10 March 2011)

[179] Forest Stewardship Council (December 2007) Forest Stewardship Council dissociates with Asia Pulp and Paper. http://www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/Stakeholder_updates/FSC_dissociates_with_APP-EN.pdf

[180] Asia Pulp & Paper (22 February 2011)

[181] On criticisms on LEI, see KKI Warsi, FZS Indonesia Program, PKHS, Jikalahari, Walhi Riau, Walhi Jambi and WWF Riau (19 November 2009) Indonesian NGOs: Even with LEI certification, APP paper products are unsustainable. http://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=12980&uLangID=1

[182] Climate for Ideas, Forests of the World, Dogwood Alliance, Hnuti DUHA, Les Amis de la Terre, Greenpeace, Sierra Club of British Columbia, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Netherlands Centre for Indigenous Peoples (September 2011) On The Ground 2011 The controversies of PEFC and SFI. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/On%20The%20Ground%2017_10_11.pdf

[183] Greenbury, A. (20 May 2011) Taking action to make the most of the Moratorium. http://www.rainforestrealities.com/2011/05/20/taking-action-to-make-the-most-of-the-moratorium/

[184] Greenbury (20 May 2011).

[185] Asia Pulp & Paper (2011) TV commercial on Dutch TV, STER.

[186] CIFOR Forest Blog (23 May 2011) Indonesia releases Presidential Instructions for logging moratorium. http://blog.cifor.org/3003/indonesia-releases-presidential-instructions-for-logging-moratorium/

[187] Eyes on the Forest (16 March 2011). Eyes on the Forest (15 March 2011).

[188] Muhammad Teguh Surya (20 June 2011) Presidential order vs. forest conversion moratorium. Opinion published by The Jakarta Post. http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/20/presidential-order-vs-forest-conversion-moratorium.html

[189] Red-monitor (14 June 2011) NGOs criticize Indonesia’s “moratorium”. http://www.redd-monitor.org/2011/06/14/ngos-criticise-indonesias-moratorium/

[190] http://www.dephut.go.id/files/SK.323_MENHUT_2011.pdf http://appgis.dephut.go.id/appgis/moratorium/SK_323_MENHUT.pdf

[191] Environmental Resource Management (2008)

[192] Asia Pulp & Paper (11 August 2008) APP Indonesia Releases Results of Carbon Footprint Assessment.

[193] Rainforest Action Network and Japan Tropical Forest Action Network (October 2010)

[194] Asia Pulp & Paper (5 April 2011)

[195] Asia Pulp & Paper (19 June 2002) APP and SMG announce detailed sustainable wood supply assessment & planning project conducted by independent 3rd party.

[196] WWF Indonesia (19 August 2003) Asia Pulp and Paper Co. Ltd. and its fiber suppliers, the Sinar Mas Group forestry companies Letter of Intent, Jakarta, Indonesia. http://assets.wwfid.panda.org/downloads/letter_of_intent_final.pdf

[197] WWF (20 February 2004) Time is running out for APP. http://assets.wwfid.panda.org/downloads/time_is_running_out_4_app.pdf WWF US (20 February 2004) WWF Calls on U.S. Retailers to Demand Paper Giant APP Stop Unsustainable Logging. http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2004/WWFPresitem691.html

[198] Eyes on the Forest (10 March 2010) 400 Indonesian NGOs reject APP’s green claims. http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=269

[199] Indonesian NGOs (10 March 2010) An Open Letter to Customers of and Investors in the Indonesian Pulp and Paper Sector. http://ran.org/sites/default/files/join_id_letter_to_pulp_and_paper_sector.pdf

[200] Laumonier, Y. (1983) International Map of the Vegetation. “Southern Sumatra”. 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia.
[201] Laumonier, Y., Purnajaya and Setiabudi (1986). International Map of the Vegetation. “Central Sumatra”. 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia.
[202] Laumonier, Y., Purnajaya, P. and S. Setiabudi (1987). International Map of the Vegetation. “Northern Sumatra”. 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia.
[203] Laumonier, Y. (1990) Search for phytogeographic provinces in Sumatra. In: Baas P, Kalkman K, Geesink R (eds) The plant diversity of Malaysia. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp 193–211.
[204] Laumonier, Y. (1997) The Vegetation and Physiography of Sumatra. Kluwer Academic Publishers.
[205] Laumonier *et al*. (2010). WWF Indonesia (2010).
[206] Wikramanayake, E.D., Dinerstein, E., Robinson, J.G., Karanth, U., Rabinowitz, A., Olson, D., Mathew, T., Hedao, P., Conner, M., Hemley, G. and Bolze, D. (1998) An Ecology-Based Method for Defining Priorities for Large Mammal Conservation: The Tiger as Case Study.
[207] Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O’Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf, and E. Wikramanayake. 2006. Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF.
[208] Blouch & Symbolon (1985) cited in Snatiapillai & Jackson (1990) The Asian Elephant: An Action Plan for its Conservation. World Conservation Union/ Species Survival Commission Asian Elephant Specialist Group. Gland, Switzerland.
[209] KKI Warsi, Frankfurt Zoological Society, Eyes on the Forest and WWF-Indonesia (14 December 2010b)
[210] Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2003). Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).